



**RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA)  
T.A 2025 - 2029**



**KECAMATAN BONTOHARU  
TAHUN 2025**

LAMPIRAN XXVII  
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 21 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT  
DAERAH

# **RENCANA STRATRGIS KECAMATAN BONTOHARU TAHUN 2025 - 2029**

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Perkenan dan Rahmat-Nya, Rencana Kerja Strategis (RENSTRA) Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 telah selesai disusun dalam bentuk dokumen.

Rencana Kerja Strategis (RENSTRA) Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai media atau dasar pertanggungjawaban atas penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi secara periodic dan melembaga.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Strategis (RENSTRA) ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi seluruh aparatur dan stakeholder di Kecamatan Bontoharu Kepulauan Selayar dalam pencapaian sasaran dan program dalam 5 (lima) tahun kedepan. Peran serta dari seluruh potensi stakeholder Kecamatan Bontoharu Kepulauan Selayar dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (RENSTRA) ini sangat mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi.

Kami menyadari dokumen Rencana Kerja Strategis (RENSTRA) Kecamatan Bontoharu Kepulauan Selayar ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami mengharapkan dari semua pihak yang berkepentingan memberikan masukan, baik itu berupa sasaran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju kearah perbaikan selanjutnya.

Akhirnya dengan telah disusunnya Rencana Kerja Stategis (RENSTRA) tersebut besar harapan Pemerintah Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar untuk dapat mencapai target kinerja serta memberikan kontribusi bagi kemaslahatan unsur aparat pemerintah dan dapat menjadi acuan dalam pencapaian kinerja serta bermanfaat bagi seluruh unsur penyelenggara program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan Bontoharu Kepulauan Selayar sebagaimana yang diharapkan, dan dapat mendorong pencapaian Visi-Misi Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka mewujudkan kesejahteraan warga dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar.

Matalalang,      September 2025

**CAMAT BONTOHARU,**

**ANDI BATARA GAU,SE**

**Pangkat : Pembina**

**NIP. 197505292010011008**

**DAFTAR ISI**

|   | Halaman |
|---|---------|
| KATA PENGANTAR  | i       |
| DAFTAR ISI  | ii      |
| <b>Bab I : PENDAHULUAN</b>  |         |
| 1.1. Latar Belakang.....  | 1-2     |
| 1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....  | 2-4     |
| 1.3. Maksud dan Tujuan.....   | 4       |
| 1.3.1 Maksud.....   | 4       |
| 1.3.2 Tujuan.....   | 5       |
| 1.4. Sistematika Penulisan.....   | 6-7     |
| <b>Bab II: GAMBARAN PELAYANAN,PERMASALAHAN &amp; ISU STRATEGIS<br/>KECAMATAN BONTOHARU</b>        |         |
| 2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Bontoharu.....   | 8       |
| 2.1.1 Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi SKPD.....   | 9-20    |
| 2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Bontoharu .....   | 20-26   |
| 2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecmatan Bontoharu.....   | 26-30   |
| 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Bontoharu.....   | 31      |
| 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Bontoharu.....                                       | 31      |
| 2.2.1 Permasalahan Pelayaan Kecamatan Bontoharu.....  | 32-34   |
| 2.2.2 Isu Strategis Kecamatan Bontoharu.....  | 34-36   |
| <b>Bab III : TUJUAN,SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>                                      |         |
| 3.1 Tujuan Renstra.....   | 37      |
| 3.2 Sasaran Renstra.....  | 37-40   |
| 3.3 Strategi dalam mencapai tujuan dan Sasaran Renstra.....                                       | 41-42   |
| 3.4 Arah Kebijakan dalam mencapai tujuan dan Sasaran Renstra .....                                | 43-44   |
| <b>Bab IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA<br/>PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>     |         |
| 4.1 Program,Kegiatan,Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Target dan Pendanaan<br>Indikatif.....      | 45-77   |
| 4.2 Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung Program<br>Prioritas Pembangunan Daerah..... | 78-81   |
| 4.3 Target keberhasilan Pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD melalui<br>IKU.....              | 81-82   |
| 4.4 Target keberhasilan Pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD melalui<br>IKK.....              | 83-84   |
| <b>Bab V: PENUTUP</b>   |         |

**DAFTAR TABEL**

|           | Halaman   |
|-----------|---|
| Tabel 2.1 | Data PNS Kecamatan Bontoharu ..... 20   |
| Tabel 2.2 | Data PNS menurut Golongan, ruang dan tingkat Pendidikan formal..... 21                  |
| Tabel 2.3 | Data Aset Kecamatan Bontoharu..... 21-26  |
| Tabel 2.4 | Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bontoharu..... 28                                |
| Tabel 2.5 | Pencapaian Kinerja Utama Kecamatan Bontoharu ..... 29                                   |
| Tabel 2.6 | Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kantor Kecamatan Bontoharu..... 32     |
| Tabel 2.7 | Permasalahan pelayanan Kecamatan Bontoharu..... 33-34                                   |
| Tabel 2.8 | Alokasi Anggaran Kecamatan Bontoharu..... 35  |
| Tabel 2.9 | Isu Strategis Kecamatan Bontoharu..... 38   |
| Tabel 3.1 | Tujuan, sasaran dan Indikator Renstra Kecamatan Bontoharu..... 41-42                    |
| Tabel 3.2 | Penahapan Renstra Kecamatan Bontoharu..... 44   |
| Tabel 3.3 | Arah Kebijakan Renstra..... 46  |
| Tabel 4.1 | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Bontoharu..... 52-68                    |
| Tabel 4.2 | Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Bontoharu..... 69-79      |
| Tabel 4.3 | Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah ..... 80-82 |
| Tabel 4.4 | Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bontoharu... ..... 84                                 |
| Tabel 4.5 | Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Bontoharu..... 83                                     |

## DAFTAR GAMBAR

|  | Halaman |
|--|---------|
| Gambar 1.1 Keterkaitan dan tahapan Penyusunan Renstra .....    | 2       |
| Gambar 2.2 Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Bontoharu..... | 19      |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana . Kebijakan tersebut juga mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah yang secara periode esuai dengan tata cara rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Sebagai salah satu fungsi dari SKPD, sebagaimana dalam Permendagri 90 Tahun 2019 nomenklatur Urusan Kewilayahan, Kecamatan dituntut bersinergi dan berintegrasi dengan SKPD lainnya dan demikian pula dengan elemen masyarakat madani dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunannya agar usulan kebutuhan terhadap berbagai akses kehidupan yang dijaring melalui proses partisipasi. Hal tersebut bertemu dengan proses teknokratik yang dilakukan oleh SKPD yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah lokal.

Rencana Strategis Kecamatan Bontoharu tahun 2025-2029 disusun yang selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Bontoharu pada dasarnya dilatar belakangi oleh kondisi yang diinginkan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2029, sebagai penjabaran dari visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025 - 2029. Dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki oleh Kecamatan Bontoharu, maka disusunlah Renstra sebagai satu bagian utuh dari manajemen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar 2025-2029. Renstra Kecamatan Bontoharu memuat kondisi yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk pernyataan visi misi dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan 2025 - 2029.

Dokumen RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2029 selanjutnya akan menjadi pedoman perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dan selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen rencana tahunan.

Gambar 1.1  
Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra PD Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017



Kecamatan Bontoharu yang berada pada arah selatan Kabupaten Kepulauan Selayar, Ibukota Kecamatan terletak di Lingkungan Tangnga-tangnga berkedudukan di Kelurahan Bontobangun, Kondisi tofografi Kecamatan Bontoharu sebagian besar terdiri dari dataran rendah dengan luas wilayah Kecamatan tercatat 128,121 km2

## 1. 2. Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029, disusun atas dasar:

1. Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) ;
2. Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk

- Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
3. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4321);
  5. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang–Undang;
  6. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  7. Undang–Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
  8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
  10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 341);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2019-2039;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 28);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 138);
17. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 84 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Bontoharu (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 532).

### **1. 3. Maksud dan Tujuan**

#### 1.3.1. Maksud

Rencana strategis / Restra Kecamatan Bontoharu Tahun 2025-2029 disusun dengan menggunakan pendekatan Sistem Manajemen Strategis (Strategic Management System) yang sifatnya sistemik dan sistematis dengan mengacu pada sistem perencanaan pembangunan nasional yang termuat dalam UU No. 25 Tahun 2004.

Rencana strategis Kecamatan Bontoharu Tahun 2025-2029 ini menjadi dasar mekanisme pengecekan dan perimbangan (check and balances) kewenangan atas kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat yang merupakan hasil Musrenbang Tingkat Desa yang kemudian disimpul dalam Musrenbang Tingkat Kecamatan Bontoharu dan kemudian dibawa ke Musrenbang Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar.

Renstra Kecamatan Bontoharu Tahun 2025-2029 ini juga menjadi harapan agar membatasi potensi pengelolaan yang tidak tepat sasaran, dan potensi penyalahgunaan sumber daya serta memastikan agar kegiatan pembangunan yang dilakukan sejalan dan searah dengan visi atau tujuan

akhir yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar pada RPJMD Tahun 2025-2029, meliputi:

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerintah di Kecamatan Bontoharu dalam melaksanakan tugas / program / kegiatan / sub kegiatan dan meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban.
- b. Memberikan gambaran dan penjelasan dalam melaksanakan tugas pada pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- c. Sebagai bahan dan gambaran bagi pihak yang berwenang untuk menetapkan suatu kebijakan / program, dalam melaksanakan pemberdayaan aparatur dan melibatkan partisipasi masyarakat secara optimal.

#### 1.3.2. Tujuan

- a. Merumuskan arah kebijakan dasar dan strategi pembangunan yang dapat mendorong peran aktif seluruh elemen masyarakat di dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera;
- b. Merumuskan instrumen dan komitmen kebijakan anggaran jangka menengah yang dapat mengikat eksekutif dan legislatif;
- c. Merumuskan kerangka strategi dan program jangka menengah yang mengandung sasaran, outcome dan output yang spesifik dan memiliki target terukur supaya memudahkan di dalam menilai kinerja organisasi;
- d. Merumuskan kebijakan, strategi dan program pembangunan yang dapat mensinergikan sumber daya atau potensi yang dimiliki dengan peluang pengembangan wilayah untuk mewujudkan tujuan akhir yang ingin dicapai;
- e. Mengintegrasikan berbagai produk dokumen (contoh: RT, RW, Dokumen Potensi Daerah yang ada di desa, dll) ke dalam sebuah rencana strategis;
- f. Merumuskan sebuah dokumen rencana strategis yang dapat dijadikan acuan untuk proses koordinasi antar program & kegiatan yang dilakukan oleh Kecamatan Bontoharu supaya tercipta sinergi untuk pencapaian tujuan akhir yang diinginkan;
- g. Merumuskan dokumen rencana strategis yang dapat mengintegrasikan berbagai kepentingan secara vertikal dan horizontal;

- h. Meletakkan fondasi dan fokus tujuan pembangunan yang hendak dicapai;
- i. Mengarahkan program dan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh elemen organisasi untuk pencapaian visi dan misi organisasi;
- j. Memudahkan di dalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan ke seluruh elemen internal maupun external organisasi untuk meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk mencapai tujuan akhir organisasi.

Selain itu Renstra ini juga sebagai sarana untuk menampung aspirasi masyarakat dan untuk menentukan arah program kegiatan Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

#### **1. 4. Sistematika Penulisan**

Rencana Startegis Kecamatan Bontoharu disusun dengan sistimatika yang mengacu pada keseluruhan materi Renstra ini disusun dan termuat dalam 5 Bab dengan sistimatika penulisan sebagai berikut :

##### **BAB I**

##### **PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini diuraikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistimatika penulisan.

##### **BAB II**

##### **GAMBARAN PELAYANAN , PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN BONTOHARU**

Memuat informasi tentang peran ( Tugas dan Fungsi ) Kecamatan Bontoharu dalam penyenlenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas, apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan Kinerja pelayanan PD (termasuk capaian SPM sesuai dengan Tufoksinya), Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dalam bab ini diperoleh informasi tentang apa saja isu-isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Kecamatan Bontoharu 2025-2029.

##### **BAB III**

##### **TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Tahun 2025-2029, serta rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Bontoharu dalam 5 tahun mendatang. Demikian pula dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD Tahun 2025-2029.

#### BAB IV

##### PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, Sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pendanaan indikatif, serta

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Startegis Kecamatan Bontoharu tahu 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indicator Kinerja Kunci IKK, indikator kinerja Kecamatan Bontoharu yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Bontoharu dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2029.

#### BAB V

##### PENUTUP

Bab ini merupakan penutup disertai peluang perubahan substansi Renstra yang perlu mendapat perhatian oleh seluruh pejabat struktural, fungsional, pegawai, serta para Kepala Desa di lingkup Kecamatan Bontoharu serta para Pemangku Kepentingan “stakeholders” lainnya sesuai tuntutan perubahan kebijakan, lingkungan strategis.

## BAB II

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN BONTOHARU**

#### **2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Bontoharu**

Kecamatan Bontoharu pada awal pemerintahannya merupakan Kecamatan yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten, yang membawahi 5 (lima) Kelurahan dan 3 (tiga) Desa, yaitu Kelurahan Benteng, Benteng Selatan, Benteng Utara, Putabangun, Bontobangun, Desa Bontoborusu, Desa Bontosunggu dan Desa Bontotangnga.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Selayar, yaitu Kecamatan Bontoharu yang masih membawahi beberapa Desa, maka pemerintah Kabupaten Selayar membagi Wilayah Pemerintahan Kecamatan menjadi 2 (dua), yaitu Kecamatan Bontoharu yang berkedudukan di Matalalang Kelurahan Bontobangun sebagai Ibukota Kecamatan Bontoharu meliputi (Kelurahan Bontobangun, Kelurahan Putabangun, Desa Bontoborusu, Desa Bontolebang, Desa Bontosunggu dan Desa Bontotangnga) ditambah 2 desa pemekaran, yaitu desa Kahu-Kahu dan Desa Kalepadang, sementara kecamatan Benteng yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten membawahi 3 (tiga) Kelurahan yaitu, Kelurahan Benteng, Kelurahan Benteng Selatan dan Kelurahan Benteng Utara.

Pembagian Wilayah tersebut di atas, dalam rangka mempercepat penataan perkotaan dan tugas-tugas di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat.

Kecamatan Bontoharu yang berada pada arah selatan Kabupaten Kepulauan Selayar, Ibukota Kecamatan terletak di Lingkungan Tangnga-Tangnga berkedudukan di Kelurahan Bontobangun. Kondisi topografi Kecamatan Bontoharu sebagian besar terdiri dari dataran rendah dengan luas Wilayah Kecamatan tercatat 128,121 km<sup>2</sup>, ketinggian tanah dari permukaan laut : 0 - 507 m, banyaknya curah hujan: 91,9 mm<sup>3</sup>/thn, Adapun batas wilayah Kecamatan Bontoharu sebagai berikut :

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bontosikuyu
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Benteng dan Bontomanai
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar dan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Flores

Wilayah administratif pemerintahan Kecamatan Bontoharu terbagi atas 6 (enam) desa yakni: Desa Bontosunggu, Desa Bontoborusu, Desa Bontolebang, Desa Bontotangga, Desa Kahu-Kahu, Desa Kalepadang dan 2 (dua) kelurahan yakni Kelurahan Bontobangun dan Kelurahan Putabangun.

### **2.1.1 Tugas ,Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Bontoharu**

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, Kecamatan Bontoharu mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dengan tata kerja sesuai dengan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 84 Tahun 2020 Tentang Kedudukan ,susunan organisasi,tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Bontoharu

Sesuai dengan hal tersebut maka di bawah ini dijelaskan tugas dan fungsi serta struktur organisasi Kecamatan Bontoharu :

#### **Tugas dan Fungsi**

##### **A. CAMAT**

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang urusan otonomi daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Untuk pelaksanaan tugasnya Camat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang urusan otonomi daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang otonomi daerah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang otonomi daerah;
- d. Pelaksanaan administrasi Kecamatan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Camat meliputi :

1. Menyusun rencana kegiatan Kecamatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Kecamatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;

5. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
6. Melaksanakan urusan pemerintahan umum;
7. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
8. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
9. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
10. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
11. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
12. Melaksanakan pembinaan dibidang mental dan keagamaan;
13. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan;
14. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/ atau kelurahan;
15. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
16. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
17. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
18. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Camat dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
19. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya,

## B. SEKRETARIS

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Kecamatan;
- b. Pengoordinasian penyusunan program, pelaporan dan hukum;
- c. Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- d. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan

e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas Sekretaris meliputi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. Melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan program kerja;
- g. Melaksanakan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- h. Mengelola administrasi umum;
- i. Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- j. Mengelola administrasi keuangan;
- k. Melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat/aparatur kecamatan;
- l. Melaksanakan dan evaluasi penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- o. Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Camat membawahi Sub bagian yang terdiri dari :

#### 1) Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pengelolaan dan pelaporan keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Program dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;

- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Subbagian Program dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. Melakukan penyiapan bahan dan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan Kecamatan tingkat Daerah;
- g. Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan kecamatan;
- h. Menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
- i. Menyusun rencana pelaksanaan dan perhitungan anggaran;
- j. Melakukan verifikasi dan fasilitasi kebendaharaan;
- k. Melakukan pengelolaan keuangan dan pemeliharaan dokumen keuangan kecamatan;
- l. Melakukan pengelolaan, pengendalian, dan evaluasi penatausahaan keuangan Kecamatan;
- m. Menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan yang meliputi realisasi anggaran bulanan, semesteran dan tahunan;
- n. Menyusun neraca keuangan kecamatan;
- o. Melakukan sistem informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan;
- p. Melakukan koordinasi, sinkronasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan Kecamatan;
- q. Menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Kecamatan;
- r. Melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program, pembangunan bidang Kecamatan;
- s. Melakukan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan;
- t. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- u. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
- v. Menyusun laporan pelaksanaan Tugas Subbagian Program dan Keuangan serta memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- w. Melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## 2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga, mengelola administrasi kepegawaian serta pengelolaan peraturan perundang-undangan..

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. Melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pemeliharaan dokumen kepegawaian;
- g. Melakukan pelayanan teknis administrasi Kecamatan;
- h. Melakukan pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat;
- i. Melakukan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris Kecamatan dan keprotokolan;
- j. Memelihara kebersihan, keindahan dan ketertiban kantor;
- k. Melakukan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- l. Melakukan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- m. Mengajukan pertimbangan hukum dalam lingkup kecamatan;
- n. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- o. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;

- p. Menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. Melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### C. SEKSI TATA PEMERINTAHAN

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemerintahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai Tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Tata Pemerintahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Tata Pemerintahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. Memfasilitasi pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- g. Melakukan pelayanan administrasi kependudukan, fasilitasi penyelenggaraan pertanahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- h. Melakukan pembinaan Desa/Kelurahan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- i. Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- j. Melakukan inventarisasi asset atau kekayaan Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pemerintah Daerah serta kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
- k. Menyiapkan rekomendasi dan perizinan tertentu;
- l. Melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- m. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- n. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### D. SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketenteraman dan ketertiban umum.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai Tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. Melakukan fasilitasi kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban;
- g. Melakukan fasilitasi sistem keamanan lingkungan;
- h. Melakukan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi pamong Praja pada Kecamatan yang bersangkutan;
- i. Melakukan dan evaluasi penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
- j. Memfasilitasi penegakan Peraturan daerah bersama PPNS;
- k. Melakukan pengamanan kebijakan Peraturan daerah dalam bidang ketenteraman dan ketertiban;
- l. Menyiapkan rekomendasi dan perizinan tertentu;
- m. Melakukan pelayanan kebersihan, keindahan dan ketertiban;
- n. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### E. SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ekonomi dan pembangunan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai Tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Ekonomi dan Pembangunan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. Melakukan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan bidang perekonomian meliputi perindustrian dan perdagangan, koperasi, pengusaha kecil dan menengah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- g. Melakukan fasilitasi bidang pertanian meliputi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- h. Melakukan pendataan, evaluasi dan pelaporan statistik pertanian secara periodik;
- i. Melakukan pendataan obyek dan subyek pajak, retribusi serta pendataan lainnya sesuai dengan kebijakan Pemerintah daerah;
- j. Memfasilitasi pengawasan dan pengendalian bidang sumber daya alam meliputi perhutanan, kepariwisataan, pertambangan dan lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- k. Menyiapkan rekomendasi perijinan tertentu;
- l. Memfasilitasi pengembangan perekonomian Desa/Kelurahan;
- m. Melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan perekonomian;
- n. Memantau pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan kebijakan Pemerintah daerah;
- o. Memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa/Kelurahan;

- p. Memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sumber daya air, pengembangan prasarana jalan jembatan dan pengembangan perumahan, pemukiman dan perkotaan sesuai dengan rencana tata ruang;
- q. Memantau dan pengendalian kegiatan bidang pembangunan meliputi pengembangan sumber daya air, pengembangan prasarana jalan dan jembatan, pengembangan perumahan, pemukiman;
- r. Memfasilitasi pengelolaan bidang pengembangan sumber daya air, prasarana jalan, jembatan dan perumahan, pemukiman sesuai dengan rencana tata ruang;
- s. Mengumpulkan dan mengelola data dibidang pengembangan jalan dan jembatan, perumahan, pemukiman serta penyehatan lingkungan;
- t. Menyiapkan rekomendasi dan perizinan tertentu;
- u. Melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pembangunan;
- v. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- w. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### F. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesejahteraan social.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai Tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Kesejahteraan Sosial untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial;
- g. Melakukan pembinaan dibidang mental dan keagamaan;

- h. Mengoordinasikan kegiatan dibidang rehabilitasi kesejahteraan sosial, bantuan sosial dan perlindungan sosial serta pengembangan dan pemberdayaan sosial;
- i. Mengoordinasikan pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
- j. Melakukan dan evaluasi penyelenggaraan urusan kesejahteraan sosial;
- k. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- l. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

G. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN DAN KELURAHAN

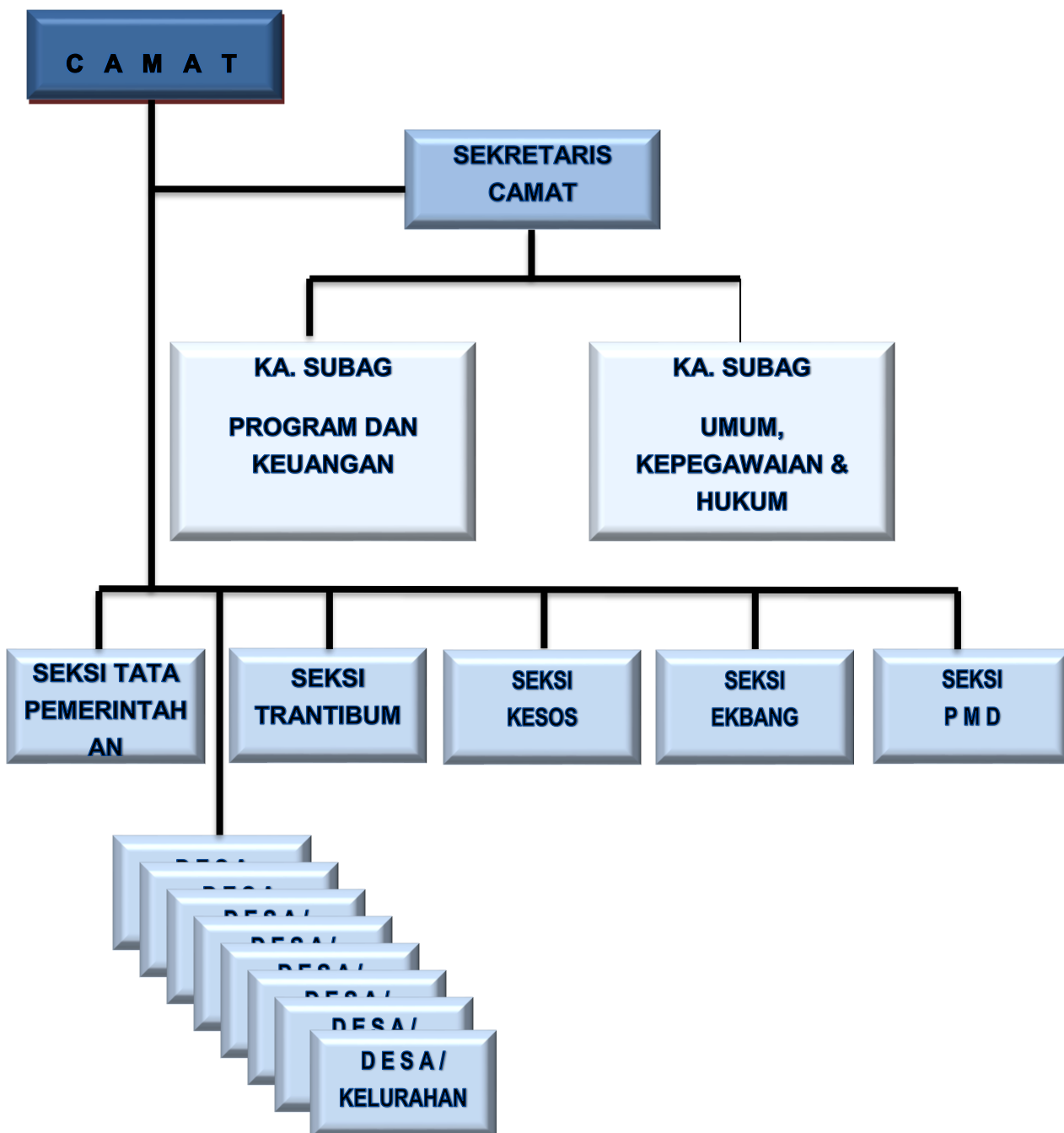
Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan Kelurahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. Melakukan fasilitasi pemberdayaan masyarakat meliputi fasilitasi pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengembangan masyarakat Desa sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- g. Melakukan fasilitasi dan pelayanan kesejahteraan sosial meliputi fasilitasi sosial, ketenagakerjaan, transmigrasi, pendidikan, kesehatan, keluarga berencana dan kehidupan keagamaan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;

- h. Menginventarisasikan dan memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan masalah sosial;
- i. Memfasilitasi pembinaan generasi muda, olahraga dan seni budaya;
- j. Melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat;
- k. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- l. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Struktur Organisasi**



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Bontoharu

**Fungsi Kecamatan**

1. Pelaksanaan perencanaan dan perumusan bahan kebijakan program kerja bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pembangunan, Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial;
2. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, penganalisisan data dibidang Pemerintahan, ketenteraman dan Ketertiban Umum, pembangunan, pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial;
3. Penyelenggaraan kegiatan perumusan, ketentraman dan Ketertiban Umum, pembangunan, pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial;
4. Pelaksanaan Inventarisasi Aset Desa atau Kekayaan Desa lainnya yang ada di Wilayah Kecamatan serta pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
5. Pelaksanaan pertimbangan pengangkatan Kepala Kelurahan;
6. Pelaksanaan peningkatan usaha-usaha pengembangan ekonomi Desa dan Kelurahan;
7. Pelaksanaan ketatausahaan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
8. Pelaksanaan pemberian rekomendasi/perizinan kewenangan dibidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pembangunan, Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan kewenangannya;
9. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
10. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait dengan kegiatan Pemerintahan Kecamatan;

**.2. 1.2. Sumber Daya Kecamatan Bontoharu**

Data PNS Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai dengan tingkat pendidikan, secara terperinci sebagai berikut :

| No | TINGKAT PENDIDIKAN | JUMLAH |      | PROSENTASE |      |
|----|--------------------|--------|------|------------|------|
|    |                    | PNS    | CPNS | PNS        | CPNS |
| 1  | S2                 | 1      | 0    | 3.70 %     | 0    |
| 2  | S1                 | 20     | 0    | 74.07 %    | 0    |
| 3  | D3                 | 0      | 0    | 0          | 0    |
| 4  | SLTA               | 6      | 0    | 22.23 %    | 0    |
| 5  | STP                | 0      | 0    | 0          | 0    |
| 6  | SD                 | 0      | 0    | 0          | 0    |
|    |                    | 27     | 0    | 100 %      | 0    |

Tabel 2.1. Data PNS Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar Sesuai dengan Tingkat Pendidikan

| No            | Gol. Ruang | Tingkat Pendidikan Formal (orang) |    |    |    |    |      |      |    | JML |
|---------------|------------|-----------------------------------|----|----|----|----|------|------|----|-----|
|               |            | S2                                | S1 | D3 | D2 | D1 | SLTA | SLTP | SD |     |
| 1             | IV/c       | -                                 | -  | -  | -  | -  | -    | -    | -  | -   |
| 2             | IV/b       | -                                 | -  | -  | -  | -  | -    | -    | -  | -   |
| 3             | IV/a       | 1                                 | 1  | -  | -  | -  | -    | -    | -  | 2   |
| 4             | III/d      | -                                 | 7  | -  | -  | -  | 0    | -    | -  | 7   |
| 5             | III/c      | -                                 | 6  | -  | -  | -  | -    | -    | -  | 6   |
| 6             | III/b      | -                                 | 4  | -  | -  | -  | 1    | -    | -  | 5   |
| 7             | III/a      | -                                 | 2  | -  | -  | -  | 2    | -    | -  | 4   |
| 8             | II/d       | -                                 | 0  | -  | -  | -  | 3    | -    | -  | 3   |
| 9             | II/c       | -                                 | -  | -  | -  | -  | 0    | -    | -  | 0   |
| 10            | II/b       | -                                 | -  | -  | -  | -  | -    | -    | -  | -   |
| 11            | II/a       | -                                 | -  | -  | -  | -  | -    | -    | -  | -   |
| <b>Jumlah</b> |            | 1                                 | 20 | 0  | -  | -  | 6    | -    | -  | 27  |

Tabel 2.2. Data PNS Menurut Golongan Ruang dan Tingkat Pendidikan Formal

Keberadaan sarana dan peralatan kerja sangat mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sarana dan Peralatan Kerja Utama di Kecamatan Bontoharu meliputi gedung kantor dan perlengkapannya.

Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di Kecamatan Bontoharu disajikan dalam bentuk inventaris barang sesuai Permendagri No 17 TH 2007 antara lain :

| NO | Jenis barang/NAMA BARANG | MERK/TYPE                        | TAHUN PEMBELIAN | ASAL USUL | KONDISI RUSAK BERAT | Harga (ribuan Rp) | KETERANGAN       |
|----|--------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|---------------------|-------------------|------------------|
| 1  | Tanah                    |                                  |                 | Pembelian |                     |                   |                  |
| 2  | Mobil                    | Avansa/Toyota / -                | 2009            | Pembelian |                     | 159.000,00        | CAMAT BONTOHARU  |
| 3  | Sepeda Motor             | Yamaha MIO S / B3B A/T           | 2018            | Pembelian |                     | 12.900,00         | SEKCAM           |
| 4  | Sepeda Motor             | Suzuki Shogun R / -              | 1998            | Pembelian |                     | 14.860,00         | STAF EKBANG      |
| 5  | Sepeda Motor             | Suzuki Shogun (F1.125 Rcd R) / - | 2008            | Pembelian |                     | 14.660,00         | KASI PERENCANAAN |
| 6  | Sepeda Motor             | Susuki shogun NR / -             | 2009            | Pembelian |                     | 15.336,00         | KASI TRANTIB     |
| 7  | Sepeda Motor             | Yamaha/Jupiter / -               | 2010            | Pembelian |                     | 15.200,00         | STAF UMUM KEPEG  |

|    |  |                         |      |           |  |           |  |
|----|--|-------------------------|------|-----------|--|-----------|--|
| 8  | Sepeda Motor                             | suzuki / UW<br>125 SC   | 2015 | Pembelian |  | 20.000,00 | KASI<br>PEMBERDA<br>YAAN<br>MASYARAK<br>AT |
| 9  | Multburst<br>Generator Unit              | Moestro / MT<br>7000 CE | 2019 | Pembelian |  | 7.900,00  |  |
| 10 | Mesin Ketik<br>Manual Standar<br>(14-16) | brother / -             | 2009 | Pembelian |  | 2.000,00  |  |
| 11 | Lemari Besi                              | Q-Biz / -               | 2008 | Pembelian |  | 1.500,00  |  |
| 12 | Lemari Besi                              | Brother / -             | 2012 | Pembelian |  | 1.400,00  |  |
| 13 | Lemari Besi                              | Q-Biz / -               | 2008 | Pembelian |  | 1.500,00  |  |
| 14 | Lemari Besi                              | - / -                   | 2009 | Pembelian |  | 2.208,00  |  |
| 15 | Lemari Besi                              | brother / -             | 2009 | Pembelian |  | 552,00    |  |
| 16 | Rak Kayu                                 | - / -                   | 2000 | Pembelian |  | 520,00    |  |
| 17 | Filling Besi/Metal                       | Brother / -             | 2011 | Pembelian |  | 1.400,00  |  |
| 18 | Lemari Kaca                              | - / -                   | 2002 | Pembelian |  | 800,00    |  |
| 19 | Lemari Kaca                              | - / -                   | 2003 | Pembelian |  | 800,00    |  |
| 20 | Lemari Makan                             | Mahkota Mas<br>/ -      | 2012 | Pembelian |  | 550,00    |  |
| 21 | Lemari kayu                              | - / -                   | 2014 | Pembelian |  | 1.000,00  |  |
| 22 | Mesin Absensi                            | -                       | 2018 | Pembelian |  | 10.000,00 |  |
| 23 | Meja Kayu/Rotan                          | Activ                   | 2018 | Pembelian |  | 2.600,00  |  |
| 24 | Meja Rapat                               | - / -                   | 2008 | Pembelian |  | 2.550,00  |  |
| 25 | Meja Rapat                               | Topix / -               | 2014 | Pembelian |  | 4.000,00  |  |
| 26 | Kursi Rapat                              | futura / -              | 2009 | Pembelian |  | 312,50    |  |
| 27 | Kursi Rapat                              | futura / -              | 2009 | Pembelian |  | 24.687,50 |  |
| 28 | Kursi Rapat                              | Futura                  | 2019 | Pembelian |  | 21.500,00 |  |
| 29 | Kursi Tamu                               | Bigtop 321 / -          | 2000 | Pembelian |  | 300,00    |  |
| 30 | Kursi Tamu                               | - / -                   | 2003 | Pembelian |  | 520,00    |  |
| 31 | Kursi Tamu                               | Bigtop 321              | 2000 | Pembelian |  | 300,00    |  |
| 32 | Kursi Tamu                               | Bigtop 321 / -          | 2000 | Pembelian |  | 300,00    |  |
| 33 | Kursi Tamu                               | -                       | 2003 | Pembelian |  | 520,00    |  |
| 34 | Kursi Tamu                               | - / -                   | 2003 | Pembelian |  | 1.040,00  |  |
| 35 | Kursi Putar                              | Isabel / -              | 2002 | Pembelian |  | 1.120,00  |  |
| 36 | Kursi Putar                              | Verona / -              | 2002 | Pembelian |  | 780,00    |  |
| 37 | Kursi Putar                              | Indachi D-620<br>/ -    | 2009 | Pembelian |  | 800,00    |  |
| 38 | Kursi Putar                              | Brother                 | 2018 | Pembelian |  | 7.000,00  |  |
| 39 | Tenda                                    | - / -                   | 2009 | Pembelian |  | 25.000,00 |  |
| 40 | Meja Biro                                | - / -                   | 2003 | Pembelian |  | 1.040,00  |  |
| 41 | Meja Biro                                | Arinda / -              | 2002 | Pembelian |  | 780,00    |  |
| 42 | Meja Biro                                | - / -                   | 2003 | Pembelian |  | 1.040,00  |  |
| 43 | Kursi Kerja                              | chitose / -             | 2009 | Pembelian |  | 3.150,00  |  |
| 44 | Mesin Potong<br>Rumput                   | matari / -              | 2011 | Pembelian |  | 1.000,00  |  |
| 45 | Lemari Es                                | Sanyo / -               | 2014 | Pembelian |  | 1.500,00  |  |
| 46 | AC Unit                                  | LG SD9LS-1 /<br>-       | 2009 | Pembelian |  | 4.000,00  |  |
| 47 | AC Unit                                  | Sharp                   | 2019 | Pembelian |  | 22.500,00 |  |
| 48 | Alat Pendingin<br>Lain-lain              | Daikin /<br>FVRN71BXV14 | 2019 | Pembelian |  | 25.000,00 |  |

|    |                             |                              |             |           |  |               |    |
|----|-----------------------------|------------------------------|-------------|-----------|--|---------------|----|
| 49 | Alat Pendingin Lain-lain    | Daikin / FVRN71BXV14         | 2019        | Pembelian |  | 25.000,00     |    |
| 49 | AC 1 PK (2 unit)            | LG Inverter                  | 19 Mei 2025 | Pembelian |  | 13.209.000,00 |    |
| 50 | Rak Piring                  | -                            | 2018        | Pembelian |  | 1.500,00      |    |
| 51 | Televisi                    | LG / -                       | 2014        | Pembelian |  | 4.000,00      |    |
| 52 | Televisi                    | LG 22 MT47AC / 22 MT47AC-PT  | 2015        | Pembelian |  | 2.500,00      |    |
| 53 | Tangga Alumunium            | -                            | 2018        | Pembelian |  | 1.500,00      |    |
| 54 | Mimbar/Podium               | - / -                        | 2003        | Pembelian |  | 500,00        |    |
| 55 | Mimbar/Podium               | - / -                        | 2009        | Pembelian |  | 1.000,00      |    |
| 56 | Alat Rumah Tangga Lain-lain | - / -                        | 2000        | Pembelian |  | 1.500,00      |    |
| 57 | P.C Unit/                   | Benq / -                     | 2011        | Pembelian |  | 4.900,00      |    |
| 58 | P.C Unit/                   | LG / -                       | 2014        | Pembelian |  | 6.000,00      |    |
| 59 | Lap Top                     | acer aspire 4730 Z / -       | 2009        | Pembelian |  | 10.000,00     | RB |
| 60 | Lap Top                     | sony valo / -                | 2012        | Pembelian |  | 10.000,00     | RB |
| 61 | Lap Top                     | Lenopo / -                   | 2014        | Pembelian |  | 12.000,00     | RB |
| 62 | Lap Top                     | Toshiba / Satelitte P 55 W-C | 2016        | Pembelian |  | 14.000,00     |    |
| 63 | Lap Top                     | Asus / X 453 s               | 2016        | Pembelian |  | 5.000,00      |    |
| 64 | Lap Top                     | Lenovo Ideapad 110-14 IBR    | 2017        | Pembelian |  | 5.000,00      |    |
| 65 | Lap Top                     | Lenovo Ideapad 110-14 IBR    | 2017        | Pembelian |  | 5.000,00      |    |
| 66 | Lap Top                     | HP / Hp                      | 2018        | Pembelian |  | 7.500,00      |    |
| 67 | Lap Top                     | HP                           | 2018        | Pembelian |  | 7.500,00      |    |
| 68 | Lap Top                     | Aser Aspira / Z476           | 2019        | Pembelian |  | 7.500,00      |    |
| 69 | Lap Top                     | Aser Aspira / Z476           | 2019        | Pembelian |  | 7.500,00      |    |
| 69 | Lap Top                     | MSI Moderna 14               | 19 Mei 2025 | Pembelian |  | 9.900,00      |    |
| 70 | Note Book                   | Accer Aspire 1 / -           | 2011        | Pembelian |  | 4.000,00      | RB |
| 71 | Note Book                   | - / -                        | 2010        | Pembelian |  | 4.000,00      |    |
| 72 | Printer                     | Canon Pixma / MP287          | 2016        | Pembelian |  | 1.000,00      |    |
| 73 | Printer                     | Caon Pixma                   | 2017        | Pembelian |  | 4.580,00      |    |
| 74 | Printer                     | Epson L 360                  | 2018        | Pembelian |  | 3.000,00      |    |

|     |   |                      |             |           |  |           |                  |
|-----|---|----------------------|-------------|-----------|--|-----------|------------------|
| 75  | Printer                                   | Canon Pixma / MP 287 | 2019        | Pembelian |  | 1.500,00  |                  |
| 76  | Printer                                   | Canon Pixma / MP287  | 2019        | Pembelian |  | 1.500,00  |                  |
| 77  | Printer                                   | Epson LX-300+ / -    | 2007        | Pembelian |  | 1.440,00  |                  |
| 78  | Printer                                   | Epson Lx-300 / -     | 2000        | Pembelian |  | 800,00    |                  |
| 79  | Printer                                   | Canon / MP 237       | 2014        | Pembelian |  | 900,00    |                  |
| 80  | Printer                                   | Canon Mp287          | 2018        | Pembelian |  | 1.500,00  |                  |
| 81  | Printer                                   | Canon Mp 287         | 2018        | Pembelian |  | 1.500,00  |                  |
| 82  | Printer                                   | Cano Hp 267          | 2018        | Pembelian |  | 1.500,00  |                  |
| 81  | Printer (2 Unit)                          | Epson                | 23 Okt 2023 | Pembelian |  | 4.688,00  | Ruangan Sekcam   |
| 82  | Printer                                   | Epson L3250          | 23 Okt 2023 | Pembelian |  | 3.595,00  | Kasubang Program |
| 83  | Meja Kerja Pejabat Eselon IV              | Olimpic              | 2018        | Pembelian |  | 6.000,00  |                  |
| 84  | Meja Kerja                                | martim MT-301 / -    | 2009        | Pembelian |  | 1.250,00  |                  |
| 85  | Meja Kerja                                | martim MT-201 / -    | 2009        | Pembelian |  | 6.075,00  |                  |
| 86  | Meja Kerja                                | martim MT-201 / -    | 2009        | Pembelian |  | 675,00    |                  |
| 87  | Meja Kerja                                | ACTIV / -            | 2015        | Pembelian |  | 2.150,00  |                  |
| 88  | Meja Tamu Ruang Tunggu Pejabat Eselon III | Bigtop 321           | 2000        | Pembelian |  | 300,00    |                  |
| 89  | Meja Tamu Ruang Tunggu Pejabat Eselon III | -                    | 2003        | Pembelian |  | 520,00    |                  |
| 90  | Meja Tamu Ruang Tunggu Pejabat Eselon III | Lokal                | 2019        | Pembelian |  | 1.100,00  |                  |
| 91  | Kursi Kerja Pejabat Eselon III            | Indachi              | 2019        | Pembelian |  | 2.000,00  |                  |
| 92  | Lemari Buku untuk Perpustakaan            | Olympic / -          | 2002        | Pembelian |  | 480,00    |                  |
| 93  | Lemari Arsip untuk arsip Dinamis          | Martin AT-01 / -     | 2009        | Pembelian |  | 1.600,00  |                  |
| 94  | Proyektor + Attachment                    | Infocus / -          | 2014        | Pembelian |  | 5.500,00  |                  |
| 95  | Equalizer                                 | dbx / -              | 2013        | Pembelian |  | 4.300,00  |                  |
| 96  | Microphone/Wireless Mic                   | Spring / -           | 2013        | Pembelian |  | 7.500,00  |                  |
| 97  | Peralatan studio Visual Lain-lain         | dbx / -              | 2013        | Pembelian |  | 4.550,00  |                  |
| 98  | Peralatan studio Visual Lain-lain         | Yamaha PSR 700 / -   | 2009        | Pembelian |  | 15.000,00 |                  |
| 99  | Peralatan studio Visual Lain-lain         | - / -                | 2013        | Pembelian |  | 3.300,00  |                  |
| 100 | Stand Microphone                          | AMS002NC / -         | 2013        | Pembelian |  | 1.100,00  |                  |

|        |   |                           |             |           |             |              |                                    |
|--------|---|---------------------------|-------------|-----------|-------------|--------------|------------------------------------|
| 101    | Camera Electronic                         | kodak easy share m753 / - | 2007        | Pembelian |             | 2.000,00     |                                    |
| 102    | Mixer PVC                                 | Yamaha / -                | 2013        | Pembelian |             | 6.800,00     |                                    |
| 103    | Loudspeaker                               | Golden Sound / -          | 2013        | Pembelian |             | 10.250,00    |                                    |
| 104    | Loudspeaker                               | golden sound / -          | 2013        | Pembelian |             | 7.200,00     |                                    |
| 105    | Loudspeaker                               | Hartke / -                | 2009        | Pembelian |             | 4.900,00     |                                    |
| 106    | Wireless Amplifier                        | Kazt.9.02 / -             | 2008        | Pembelian |             | 1.600,00     |                                    |
| 104    | Speaker                                   | Advance K18-12            | 23 Ok 2023  | Pembelian |             | 3.658,00     |                                    |
| 105    | Scanner                                   | Epson DS-410              | 19 Mei 2025 | Pembelian |             | 9.100,00     |                                    |
| 106    | Proyektor / LCD                           | Epson EB-E 600            | 19 Mei 2025 | Pembelian |             | 6.400,00     |                                    |
| 107    | Bangunan Gedung Kantor Permanen           |                           | 31/12/2006  | Pembelian |             | 76.500,00    | kantor camat lama (mesium)         |
| 108    | Bangunan Gedung Kantor Permanen           |                           |             | Pembelian |             | 826.770,59   | kantor camat bontoharu             |
| 109    | Bangunan Gedung Kantor Permanen           |                           | 16/12/2013  | Pembelian |             | 191.446,61   | Penimbunan Halaman Kantor Camat    |
| 110    | Bangunan Gedung Kantor Permanen           |                           |             | Pembelian |             | 0,00         | Kantor Camat                       |
| 111    | Bangunan Gedung Instalasi lain-lain       |                           |             | Pembelian |             | 172.858,61   | paving blok kantor camat bontoharu |
| 112    | Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen |                           |             | Pembelian |             | 212.485,55   | aula kantor camat                  |
| 113    | Konstruksi Pagar                          |                           |             | Pembelian |             | 220.244,25   | Pagar Depan Kantor                 |
| 114    | Rumah Negara Golongan III Lain-lain       |                           |             | Pembelian |             | 102.500,00   | Rumah dinas Camat                  |
| JUMLAH |   |                           |             |           |             | 2.545.610,60 |                                    |
| 1      | Sepeda Motor                              | Suzuki TRX                | 1998        | Pembelian | Rusak Berat | 3.600,00     | Fisik masi ada/di bagian aset      |
| 2      | Loudspeaker                               | Audio Blast AU 900 w / -  | 2001        | Pembelian | Rusak Berat | 240,00       | Fisik Ada                          |
| 3      | Mesin Ketik Lain-Lain                     | Olypia / -                | 2002        | Pembelian | Rusak Berat | 400,00       | Fisik Ada                          |
| 4      | PC Unit/ Komputer PC                      | Giga Pro / -              | 2002        | Pembelian | Rusak Berat | 8.160,00     | Fisik Ada                          |
| 5      | Meja Biro                                 | Olympic /-                | 2003        | Pembelian | Rusak Berat | 300,00       | Fisik Tidak ada                    |
| 6      | P.C Unit / Komputer PC                    | HP. Compaq / -            | 2003        | Pembelian | Rusak Berat | 6.400,00     | Fisik Tidak ada                    |
| 7      | P.C Unit / Komputer PC                    | Samsung / -               | 2003        | Pembelian | Rusak Berat | 6.400,00     | Fisik Tidak ada                    |
| 8      | Sepeda Motor                              | Suzuki Thunder/-          | 2007        | Pembelian | Rusak Berat | 14.360,00    | Fisik masi ada di kec Bontoharu    |
| 9      | Printer                                   | HP. Deskjet F380          | 2008        | Pembelian | Rusak Berat | 1.200,00     | Fisik Tidak ada                    |

|        |   |                    |      |           |             |           |                 |
|--------|---|--------------------|------|-----------|-------------|-----------|-----------------|
| 10     | P.C Unit/<br>Komputer PC                | Beyond / -         | 2009 | Pembelian | Rusak Berat | 9.000,00  | Fisik Ada       |
| 11     | Printer                                 | Cannon / -         | 2009 | Pembelian | Rusak Berat | 1.200,00  | Fisik Ada       |
| 12     | Peralatan komputer main frame lain-lain | HP. Deskjet D1660  | 2010 | Pembelian | Rusak Berat | 500,00    |                 |
| 13     | Meja Biro                               | Olympic / -        | 1003 | Pembelian | Rusak Berat | 300,00    | Fisik Tidak ada |
| 14     | Kursi Putar                             | Isabel             | 2003 | Pembelian | Rusak Berat | 480,00    | Fisik Tidak ada |
| 15     | Kursi Rapat                             |                    | 2003 | Pembelian | Rusak Berat | 160,00    | Fisik Tidak ada |
| 16     | Kursi Rapat                             |                    | 2003 | Pembelian | Rusak Berat | 320,00    | Fisik Tidak ada |
| 17     | Kursi Rapat                             | Paragon / -        | 2002 | Pembelian | Rusak Berat | 35,00     | Fisik Tidak ada |
| 18     | Kursi Rapat                             | Edenia / -         | 2002 | Pembelian | Rusak Berat | 32,00     | Fisik Tidak ada |
| 19     | Kursi Tamu                              |                    | 2002 | Pembelian | Rusak Berat | 1.800,00  | Fisik Tidak ada |
| 20     | Meja Biro                               | Olympic / -        | 2003 | Pembelian | Rusak Berat | 300,00    | Fisik Tidak ada |
| 21     | Kaca Riben                              |                    | 2002 | Pembelian | Rusak Berat | 128,00    | Fisik Tidak ada |
| 22     | Televisi                                | Akira 14,matrix    | 2008 | Pembelian | Rusak Berat | 2.500,00  | Fisik Tidak ada |
| 23     | Laptop                                  | Tosiba Satellite   | 2007 | Pembelian | Rusak Berat | 10.000,00 | Fisik Ada       |
| 24     | Personal Komputer Lain-lain             | Kenika 500 V/-     | 2003 | Pembelian | Rusak Berat | 300,00    | Fisik Tidak ada |
| 25     | Stan microphone                         | BMA {Bear Moutain  | 2011 | Pembelian | Rusak Berat | 700,00    | Fisik Ada       |
| 26     | Microphone                              | Audio Blast AU 900 | 2001 | Pembelian | Rusak Berat | 160,00    | Fisik Ada       |
| 27     | Radio HF /FM lain-lain                  | Polytron           | 2008 | Pembelian | Rusak Berat | 800,00    | Fisik Tidak ada |
| 28     | Radio HF /FM lain-lain                  | Sanken 1200 watt   | 2001 | Pembelian | Rusak Berat | 800,00    | Fisik Ada       |
| JUMLAH |   |                    |      |           |             | 70.575,00 |                 |

Tabel 2.3. Tabel Data aset

### 2.1 3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Bontoharu

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat trend yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun yang lalu. Dengan mengamati kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun ke belakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun ke depan.

Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Bontoharu berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan Nomor 09 Tahun 2007,

berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Bontoharu periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Kecamatan Bontoharu dan/atau indikator lainnya seperti SDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Bahan penulisan tentang kinerja pelayanan Kecamatan Bontoharu ini mengacu pada hasil kerja .

**Tabel 2.4**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bontoharu**  
**Kabupaten Kepulauan Selayar**

| No    | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD              | IKK  | Target Renstra PD Tahun Ke- |          |          |          |          | Realisasi Capaian Tahun Ke- |          |          |          |          | Rasio Capaian Pada Tahun Ke- |        |        |        |        |
|-------|---|--|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|       |   |  | 2020                        | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2020                        | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2020                         | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
| ( 1 ) | ( 2 )   | ( 4 )  | ( 6 )                       | ( 7 )    | ( 8 )    | ( 9 )    | ( 10 )   | ( 11 )                      | ( 12 )   | ( 13 )   | ( 14 )   | ( 15 )   | ( 16 )                       | ( 17 ) | ( 18 ) | ( 19 ) | ( 20 ) |
| 1.    | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Peningkatan Pelayanan di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan          | 35 Menit                    | 30 Menit | 25 Menit | 20 Menit | 15 Menit | 35 Menit                    | 30 Menit | 25 Menit | 20 Menit | 15 Menit | 100 %                        | 100 %  | 100%   | 100%   | 100%   |
| 2.    | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan        | Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan        | 100 %                       | 100 %    | 100%     | 100%     | 100%     | 100 %                       | 100      | 99,99%   | 100%     | 97%      | 100 %                        | 100 %  | 100%   | 100%   | 100 %  |
| 3.    | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum        | Persentase kasus Kriminalitas di tingkat kecamatan                     | 1%                          | 1%       | 1%       | 1%       | 1%       | 0,1%                        | 0,1%     | 0,1%     | 0,3%     | 0,4%     | 190%                         | 190%   | 190%   | 170%   | 160%   |
| 4.    | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum          | Persentase Konflik Sosial dan Keagamaan di tingkat kecamatan           | 0%                          | 0%       | 0%       | 0%       | 0%       | 0%                          | 0%       | 0%       | 0%       | 0%       | 100%                         | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   |
| 5.    | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa        | Persentase Program pemerintahan desa yang mendukung program pemerintah | 50                          | 55%      | 60%      | 65%      | 70%      | 98,65 %                     | 87,74 %  | 94,60%   | 96%      | 98,05    | 197%                         | 159%   | 157%   | 181%   | 198%   |

**Tabel 2.5**  
**Pencapaian Indikator Kinerja Utama**  
**Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar**

| No    | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD                                  | IKK  | Target Renstra PD Tahun Ke- |         |        |        |        | Realisasi Capaian Tahun Ke- |         |        |        |        | Rasio Capaian Pada Tahun Ke- |        |        |        |        |
|-------|---|--|-----------------------------|---------|--------|--------|--------|-----------------------------|---------|--------|--------|--------|------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|       |   |  | 2020                        | 2021    | 2022   | 2023   | 2024   | 2020                        | 2021    | 2022   | 2023   | 2024   | 2020                         | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
| ( 1 ) | ( 2 )   | ( 4 )  | ( 6 )                       | ( 7 )   | ( 8 )  | ( 9 )  | ( 10 ) | ( 11 )                      | ( 12 )  | ( 13 ) | ( 14 ) | ( 15 ) | ( 16 )                       | ( 17 ) | ( 18 ) | ( 19 ) | ( 20 ) |
| 1.    | Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan Bontoharu    | Laporan Keuangan Kecamatan Bontoharu sesuai SAP                      | Sesuai                      | Sesuai  | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai                      | Sesuai  | Sesuai | Sesuai | Sesuai | 100 %                        | 100 %  | 100%   | 100%   | 100%   |
|       |   | Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bontoharu                       | 69 %                        | 69.50 % | 70 %   | 72,5%  | 75%    | 69 %                        | 69.50 % | 70 %   | 72,5%  | 75%    | 100 %                        | 100 %  | 100%   | 100%   | 100 %  |
| 2.    | Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa                            | Persentase Peningkatan Fungsi Lembaga Desa yang di koordinasikan     | 60%                         | 61%     | 63%    | 66%    | 70%    | 60%                         | 61%     | 62,5%  | 66%    | 68%    | 100 %                        | 100 %  | 99,99% | 100%   | 97%    |
| 3.    | Meningkatnya tatanan kehidupan sosial masyarakat                              | Tingkat Solidaritas Sosial di Kecamatan Bontoharu                    | 67%                         | 68%     | 69%    | 70%    | 71%    | 67%                         | 68%     | 69%    | 70%    | 71%    | 100 %                        | 100 %  | 100%   | 100%   | 100 %  |
| 4.    | Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan di Kecamatan Bontoharu | Persentase Program Pemerintah Desa yang mendukung Program Pemerintah | 60%                         | 62%     | 63%    | 65%    | 67%    | 65%                         | 67%     | 70%    | 75%    | 80%    | 100%                         | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   |

Rencana Strategis (Renstra) 2025– 2029 Kecamatan Bontoharu

|    |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|--|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 5. | Meningkanya Kualitas Pemerintahan Desa | Persentase Urusan Pemerintah Desa yang difasilitasi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|----|--|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

#### **2.1 4. Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Bontoharu**

Tugas pokok SKPD Kecamatan Bontoharu yaitu koordinasi, penyelenggaraan Pemerintahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan

Berdasarkan aspek pelayanan yang diberikan Kecamatan Bontoharu, maka yang menjadi target pelayanan atau kelompok sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu dan fungsinya:

- a. Unsur Pimpinan (Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah ), Pelaporan Data koordinasi kependudukan, pelayanan dan hal-hal yang sesuai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan wilayah kecamatan
- b. Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayardalam hal-hal yang sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan
- c. Pemangku kepentingan dalam hal menjaring aspirasi dan partisipasi dalam perencanaan pembangunan serta penyediaan informasi pembangunan
- d. Aparat Desa dan Kelurahan di Wilayah Kecamatan Bontoharu
- e. Seluruh Masyarakat Kecamatan Bontoharu dalam hal pelayanan dan non perizinan

Tabel 2.6. Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kantor Kecamatan Bontoharu tahu 2021-2025 (TC.24)

| Uraian                            | Anggaran Tahun ke-<br>(000) |               |               |               |               | Realisasi Anggaran Tahun ke-<br>(000) |               |               |               |               | Rasio Antara Realisasi dan<br>Anggaran (%) |         |         |         |         | Rata-Rata<br>Pertumbuhan<br>(%) |           |
|-----------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|---------|---------|---------|---------|---------------------------------|-----------|
|                                   | 2020                        | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2020                                  | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2020                                       | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | Anggaran                        | Realisasi |
| <b>Belanja Daerah</b>             |                             |               |               |               |               |                                       |               |               |               |               |  |         |         |         |         |                                 |           |
| <b>1. Belanja Tidak Langsung</b>  |                             |               |               |               |               |                                       |               |               |               |               |  |         |         |         |         |                                 |           |
| a. <b>Belanja Pegawai</b>         | 2.502.800                   | 2.481.930.000 | 2.768.507.724 | 2.593.850.275 | 2.647.740.000 | 2311.134.302                          | 2.451.025.250 | 2.461.039.369 | 2.469.786.499 | 2.537.317.988 | 92,3 %                                     | 98,75 % | 88,89 % | 95,22 % | 94,86 % |                                 |           |
| b. <b>Belanja Hibah</b>           | 0                           | 244.514.750   | 0             | 0             | 132.942.520   | 0                                     | 130.400.000   | 131.685.000   | 0             | 129.943.520   | 0  | 99,77 % | 0       | 0       | 97,75 % |                                 |           |
| <b>2. Belanja Langsung</b>        |                             |               |               |               |               |                                       |               |               |               |               |  |         |         |         |         |                                 |           |
| a. <b>Belanja Pegawai</b>         | 80.100.000                  | 0             | 0             | 0             | 0             | 80.100.000                            | 0             | 0             | 0             | 0             | 100%                                       | 0       | 0       | 0       | 0       |                                 |           |
| b. <b>Belanja barang dan Jasa</b> | 367.042.295                 | 2.200.337.254 | 2.768.507.724 | 2.646.672.563 | 2.609.516.374 | 361.752.807                           | 2.200.337.254 | 2.304.388.022 | 2.557.635.137 | 2.446.011.594 | 98,8 %                                     | 97,99 % | 83,23%  | 96,64 % | 93,75 % |                                 |           |
| c. <b>Belanja Modal</b>           | 0                           | 1.613.417.996 | 0             | 1.557.824.437 | 1.365.198.246 | 0                                     | 1.605.934.288 | 1.451.065.337 | 1.528.169.772 | 1.363.716.346 | 0  | 99,54 % | 0       | 98,10 % | 99,89 % |                                 |           |

**2.1 4. Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Bontoharu**

Tugas pokok SKPD Kecamatan Bontoharu yaitu koordinasi, penyelenggaraan Pemerintahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan

Berdasarkan aspek pelayanan yang diberikan Kecamatan Bontoharu, maka yang menjadi target pelayanan atau kelompok sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu dan fungsinya:

- a. Unsur Pimpinan (Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah ), Pelaporan Data koordinasi kependudukan, pelayanan dan hal-hal yang sesuai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan wilayah kecamatan
- b. Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayardalam hal-hal yang sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan
- c. Pemangku kepentingan dalam hal menjaring aspirasi dan partisipasi dalam perencanaan pembangunan serta penyediaan informasi pembangunan
- d. Aparat Desa dan Kelurahan di Wilayah Kecamatan Bontoharu
- e. Seluruh Masyarakat Kecamatan Bontoharu dalam hal pelayanan dan non perizinan

**2.2. Permasalahan Pelayanan dan isu strategis Kecamatan Bontoharu**

**2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Bontoharu**

Pemerintah Kecamatan Bontoharu menyadari bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi terutama dalam hal optimalisasi pelayanan kepada masyarakat membutuhkan upaya yang maksimal dan sungguh-sungguh agar pelayanan yang diberikan tersebut dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat secara menyeluruh dengan kualitas pelayanan prima yang optimal.

Tabel 2.7 Permasalahan pelayanan (TB.35)

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

| No. | Masalah Pokok   | Masalah  | Akar Masalah  |
|-----|---|--|---|
| 1   | Tata kelola organisasi dan manajemen pemerintahan serta profesionalitas ASN | Optimalnyapelayanan publikkepada masyarakat yang sepenuhnya belum terlaksana | .1 Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan publik |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|   |  | Optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan perijinan tepat waktu              | 2. Belum optimalnya pelayanan perijinan dan administrasi kependudukanyang terlayani  |
|   |  | Maksimalisasi tingkat capaian keterisian data Monografi dan profil kecamatan yang belum lengkap | Data kelengkapan monografi dan profil kecamatan yang bersumber dari data profil desa yang belum lengkap  |
|   |  | Belum optimalnya Realisasi Capaian APBDes   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan keuangan desa yang tepat waktu dan sesuai standarpelaporan belum terlaksana dengan baik.</li> <li>2. Laporan pelaksanaan pembangunan desa yang belum terkoordinasikan dengan rutin</li> <li>3 Koordinasi dan fasilitasi penyusunan laporan keuangan yang belum terlaksana dengan serius</li> <li>4 Laporan keuangan desa yang tepat waktu dan sesuai standarpelaporan belum terlaksana dengan baik.</li> <li>5 Laporan pelaksanaan pembangunan desa yang belum terkoordinasikan dengan rutin</li> <li>6 Koordinasi dan fasilitasi penyusunan laporan keuangan yang belum terlaksana dengan serius</li> </ol> |
| 2 | Ketentraman, ketertiban dan keamanan (K3) dalam Masyarakat | Masih adanya Kriminalitas di wilayah kecamatan  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rasio Poskamling dan anggota Linmas yang belumsesuai</li> <li>2. Sosialisasi kesadaran hukum yang belum terlaksana dengan baik dan rutin</li> </ol>  |
|   |  | Masih rendahnya tingkat poskamling dan Linmas aktif   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rasio Poskamling dan anggota Linmas yang belumsesuai</li> <li>2. Sosialisasi kesadaran hukum yang belum terlaksana dengan baik</li> </ol>  |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  | dan rutin  |
| 3 | Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat serta penguatan kelompok yang rentan | Lembaga kemasyarakatan yang berprestasi dan aktif di desa yang masih rendah  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum aktifnya lembaga kemasyarakatan (LPMD, PKK, RT/RW, Karang Taruna, Posyandu) di desa</li> <li>2. Motivasi partisipasi keberdayaan masyarakat yang masih berorientasi pemenuhan kebutuhan hidup</li> </ol>   |
|   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimalisasi bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat</li> <li>- Belum optimalnya ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Data yang belum sempurna dan terkesan seadanya dan terkesan keperpihakan</li> <li>2 Belum optimalnya penyaluran rastra, PKH, bantuan keagamaan kepada masyarakat desa</li> <li>3 Sosialisasi bahwa tidak sepantasnya terus-menerus menerima bantuan.</li> </ol> |
|   |  | Usulan masyarakat yang masuk dalam APBD dan Musrenbang Kabupaten yang belum terakomodir dengan seksama   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang desa dan kecamatan</li> <li>2 Tingkat keterserapan usulan yang prioritas di desa ke dalam prioritas anggaran kegiatan belum maksimal</li> </ol>   |

Disimpulkan beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Bontoharu dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan Bontoharu. Peta kendala-kendapa tersebut, sebagai berikut :

1. Sumber daya Aparatur sebagai instrument utama pelayanan masyarakat relative belum tersedia memadai.

Sebagaimana yang dipaparkan secara umum di Bab sebelumnya perihal gambaran pelayanan Kecamatan Bontoharu, bahwa ketersediaan SDM Aparatur yang tidak memadai. Dengan kondisi geografis dengan jumlah penduduk sebanyak 15.224 jiwa tentunya membutuhkan presentase ketersediaan SDM Aparatur yang ideal.

Kondisi SDM Aparatur di Kantor Kecamatan Bontoharu saat ini sebanyak 27 PNS dan 32 PTT dengan beban tugas yang cukup berat menjadi permasalahan tersendiri dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan dan pelayanan kemasyarakatan di Kecamatan Bontoharu.

2. Kualitas koordinasi lintas sektor instansi pemerintah yang relatif kurang

Dampak dari keterbatasan ketersediaan SDM Aparatur Pemerintah di Kecamatan Bontoharu adalah pada kualitas koordinasi antar sektor pemerintah yang relative kurang. Hal ini tercermin dari kinerja beberapa urusan pemerintah yang tidak optimal, antara lain : pendidikan, kesehatan, energy dan sumber mineral, kelautan dan perikanan, pertanian serta perhubungan

3. Alokasi anggaran yang belum ideal

Dibandingkan dengan beban tugas dan luas wilayah kerja yang ada di Kecamatan Bontoharu, alokasi anggaran yang selama ini dikelola Kecamatan Bontoharu relatif tidak ideal.

Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut :

. Tabel 2.8 Perkembangan Alokasi Anggaran Kecamatan Bontoharu.

| Tahun | Alokasi Anggaran | % |
|-------|------------------|---|
| 2020  | 2.537.317.988    |   |
| 2021  | 6.540.200.009    |   |
| 2022  | 5.537.015.448    |   |
| 2023  | 6.798.347.275    |   |
| 2024  | 6.782.394.140    |   |
| 2025  | 5.544.366.900    |   |

4. Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan yang masih relatif kecil

Penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan dapat dapat berdayaguna dan berhasilguna, apabila mendapat dukungan dan partisipasi aktif dan segenap komponen lapisan masyarakat.

Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi terhadap tingkat kesadaran masyarakat dalam memberikan partisipasinya pada setiap kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Bontoharu, dapat disimpulkan bahwa kesadaran partisipatif masyarakat masih relative rendah. Hal ini disebabkan antara lain : tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, dan beban ekonomi yang dihadapi masyarakat dirasakan cukup berat, sehingga untuk meluangkan waktu dalam rangka terlibat dalam berbagai aktifitas kegiatan pemerintahan dan pembangunan sangat sulit.

Selanjutnya Gerakan Membangun Desa Mandiri atau lebih dikenal dengan istilah GERBANGSARI merupakan Program Unggulan sebagai penguat atau sebagai penopang dari pilar pembangunan. Gerbangsari mempunyai dua dimensi pelaksanaan

yaitu meningkatkan status desa dan meningkatkan ekonomi perdesaan dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan utama meningkatkan kegiatan ekonomi perdesaan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Sasaran yang ingin dicapai dari dua dimensi pelaksanaan tersebut adalah pembangunan dan peningkatan prasarana perdesaan, penataan kawasan permukiman, dan pembangunan ekonomi perdesaan. Program Gerbagsari dilaksanakan melalui penyediaan payung hukum petunjuk pelaksanaan, dianggarkan melalui APBD atau sumber pendanaan lain yang sah. Sementara itu kegiatan OPD yang lingkup kegiatannya sama atau sejalan dapat diintegrasikan ke dalam program Gerbangsari.

### **2.2.2. Isu Startegis**

Dari hasil telaah berbagai dokumen strategis sebagaimana diuraikan sebelumnya, terdapat berbagai isu strategi yang dikelompokkan ke dalam isu strategis hasil analisis lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan serta isu strategis hasil analisis lingkungan eksternal berupa peluang dan tantangan.

#### **1. Analisis Lingkungan Internal**

##### **a. Kekuatan**

- ❖ Komitmen Camat beserta jajaran pemerintahan pada tingkat kecamatan dan desa dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.
- ❖ Wilayah kerja kecamatan yang luas dengan potensi sumber daya alam yang melimpah baik potensi yang ada di darat maupun potensi kelautan. Khusus untuk potensi kelautan yang sangat dominan dan potensial untuk dikembangkan.
- ❖ Potensi pengembangan sektor pariwisata yang berada di wilayah Kecamatan Bontoharu.

##### **b. Kelemahan**

- ❖ Terbatasnya ketersediaan SDM aparatur baik dari sisi jumlah maupun kualitas.
- ❖ Lemahnya intensitas dan kualitas koordinasi baik antar bidang, antar sektor, maupun antar tingkat pemerintahan.
- ❖ Terbatasnya sarana dan prasarana pemerintahan baik pada tingkat kecamatan maupun desa yang berorientasi pada pengembangan potensi kelautan juga potensi perkebunan dll.
- ❖ Masih terbatasnya fasilitas kerja.

- ❖ Alokasi anggaran kecamatan yang relative masih rendah jika dibandingkan dengan luas wilayah, beban, dan volume kerja serta resiko dalam melaksanakan tugas kedinasan.
- ❖ Kualitas SDM masyarakat yang relative rendah yang disebabkan dari masih rendahnya tingkat pendidikan secara umum.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Peluang

- ❖ Nilai ekonomis komoditas pertanian, perkebunan, dan perikanan yang relative tinggi di pasar regional, nasional, maupun global.
- ❖ Potensi investasi yang relative besar dan prospektif terutama di sektor perikanan dan pariwisata (bahari).

b. Tantangan

- ❖ Kondisi topografi Kecamatan Bontoharu yang wilyahnya sebagian besar adalah dataran rendah.
- ❖ Akses yang ke Desa-desa pulau yang ada dalam wilayah Kecamatan Bontoharu yang hal ini juga tergantung pada kondisi cuaca.
- ❖ Masih terbatasnya layanan infrastruktur dasar, meliputi : kesehatan, pendidikan, jalan, listrik, air bersih, gudang produksi, pangan, dan infrastruktur kelautan.

**Tabel 2.9 ISU TRATEGIS PD**

| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN | PERMASALAHAN PD                                  | ISU K LHS YANG RELEVAN DENGAN PD | ISU LINGKUNGAN YANG DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD |  |  | ISU STRATEGIS PD                   |
|--|--|----------------------------------|--|--|--|------------------------------------|
|  |  |                                  | GLOBAL   | NASIONAL                                 | REGIONAL                                     |                                    |
| 1                                      | 2  | 3                                | 4  | 5  | 6  | 7                                  |
|  | Lemahnya Tata kelola organisasi dan Pemerintahan | Tata kelola Pemerintahan         |  | Tata kelola dan Akuntabilitas Pemerintah | Penguatan Kelembagaan dan Kemandirian Fiskal | Penguatan Tata kelola Pemerintahan |

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 3. 1. Tujuan Renstra Kecamatan Bontoharu

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Tujuan Renstra Kecamatan Bontoharu adalah : **Meningkatkan kualitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan ketentraman masyarakat di kecamatan melalui tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.**

#### 3. 2. Sasaran Renstra Kecamatan Bontoharu

Sasaran adalah target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Adapun sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2025-2029 yang kemudian diimplementasikan dalam Renstra Kecamatan Bontoharu 2025-2029 yang dirumuskan berdasarkan masing-masing misi adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatkan Pengelolaan Pemerintahan yang Akuntabel dan Adaptif, memiliki tujuan:

1. Meningkatkan birokrasi pemerintahan transparan dan kolaboratif di Kecamatan Bontoharu, dengan sasaran berikut:
  - Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Bontoharu

Misi 4 : Meningkatkan Pengelolaan sumber daya perdesaan, memiliki tujuan:

2. Meningkatkan status Desa di Kecamatan Bontoharu, dengan sasaran berikut ini :
  - Meningkatnya partisipasi masyarakat di kecamatan Bontoharu
  - Meningkatnya Kualitas pemerintahan Desa di Kecamatan Bontoharu

Misi 6 : Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial, Budaya dan Agama, memiliki tujuan:

- 3 Meningkatkan kehidupan beragama yang maslahat dan berkebudayaan maju di Kecamatan Bontoharu dengan sasaran berikut ini :

- a. Meningkatkan kerukunan dan toleransi masyarakat di Kecamatan Bontoharu.
- b. Meningkatkan pembinaan dan pencegahan penyalagunaan narkoba di Kecamatan Bontoharu dengan sasaran berikut:
  - Menurunkan kasus penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Bontoharu

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Bontoharu tahun 2025 – 2029 sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR RENSTRA KECAMATAN BONTOHARU

| NSPK DAN SASARAN RPJM YANG RELEVAN | TUJUAN   | SASARAN  | INDIKATOR  | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN |         |         |         |         |         | KET |
|------------------------------------|--|--|--|---------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
|                                    |  |  |  |                     | 2025         | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |     |
| 1                                  | 2  | 3  | 4  | 5                   | 6            | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      | 12  |
|                                    | Meningkatkan kualitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan ketentraman masyarakat di Kecamatan melalui tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien |  | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Bontoharu | 79,61%              | 79,65%       | 80%     | 82,5%   | 85%     | 88%     | 90%     |     |
|                                    |  | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan (S1)                      | Nilai SAKIP Kecamatan Bontoharu  | n/a                 | 40           | 41      | 42      | 43      | 44      | 45      |     |
|                                    |  | Terwujudnya pelayanan administrasi umum yang cepat, mudah dan akuntabel (S2) | Waktu rata-rata penyelesaian layanan administrasi (menit)                    | 10 menit            | 10 menit     | 8 menit | 8 menit | 5 menit | 5 menit | 5 menit |     |

|  |  |   |   |           |           |           |           |           |           |           |           |  |
|--|--|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
|  |  | Menguatnya peran lembaga kemasyarakatan di tingkat Desa / Kelurahan (S3)  | Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang menerima pembinaan dan fasilitasi dari Kecamatan | 2 Lembaga | 2 Lembaga | 2 Lembaga | 2 Lembaga | 2 Lembaga | 2 Lembaga | 2 Lembaga | 2 Lembaga |  |
|  |  | Meningkatnya pembinaan terhadap UMKMd di wilayah Kecamatan (S4)   | Pertumbuhan jumlah UMKM di Wilayah Kecamatan  | 35%       | 37%       | 39%       | 41%       | 43%       | 45%       | 47%       |           |  |
|  |  | Meningkatnya Koordinasi dengan unsur Forum koordinasi Pimpinan Kecamatan (FORKOPIMCAM) dalam menjaga stabilitas keamanan (S5) | Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan bersama Forkopimcam                       | 4 kali    | 4 kali    | 4 kali    | 4 kali    | 4 kali    | 4 kali    | 4 kali    | 4 kali    |  |

### **3.3 Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Bontoharu Tahun 2025-2029**

Strategi merupakan tahapan atau langkah-langkah perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan. Strategi mengimplementasikan sasaran pembangunan yang akan dicapai dengan sejumlah arah kebijakan. Perumusan strategi dirumuskan dengan memperhatikan masalah agar lebih terarah dalam pencapaian sasaran pembangunan. Strategi ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program.

Adapun strategi yang dilakukan untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai yaitu :

1. Meningkatkan pelatihan dan pendidikan bagi aparatur;
2. Mengintegrasikan sistem informasi yang ada untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas;
3. Meningkatkan Kualitas pelayanan dan keterbukaan informasi publik;
4. Mengembangkan kapasitas kelembagaan masyarakat pedesaan;
5. Meningkatkan keterampilan manajerial dan pengetahuan teknis aparatur desa;
6. Mengadakan sosialisasi, dialog dan komunikasi antar kelompok masyarakat untuk mempromosikan pemahaman dan toleransi;
7. Mengembangkan kerja sama antar lembaga dan masyarakat;
8. Mengembangkan kerja sama antar lembaga-lembaga yang terkait;

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab satu sasaran pembangunan ataupun lebih dari satu sasaran pembangunan, dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran.

**Tabel 3.2 PENAHPAN RESTRA PD**

| TAHAP 1<br>(2026)                                    | TAHAP II<br>(2027)             | TAHAP III<br>(2028)     | TAHAP IV<br>(2029)      | TAHAP V<br>(2030)   |
|--|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| 1  | 2                              | 3                       | 4                       | 5   |
| Penguatan Sistem Pelayanan dan Penguatan Kelembagaan | Pembinaan dan Pengembangan SDM | Pengawasan dan Evaluasi | Konsolidasi dan Inovasi | Peningkatan koordinasi dengan aparat keamanan, program pencegahan kejahatan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat |

### **3.4. Arah kebijakan Kecamatan Bontoharu dalam mencapai tujuan dan Sasaran Renstra tahun 2025-2029**

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Kebijakan yang dirumuskan harus dapat:

1. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional;
2. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional;
3. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas Kecamatan Bontoharu yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih; dan
4. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tupoksi Kecamatan Bontoharu agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Sebagai satu cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi, maka arah Kebijakan Pembangunan Kecamatan Bontoharu sampai dengan akhir tahun 2029 dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur;
2. Mengimplementasikan Teknologi informasi;
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan;
4. Meningkatkan kapasitas masyarakat pedesaan;
5. Meningkatkan Kapasitas dan kompetensi aparatur desa;
6. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang keragaman;
7. Meningkatkan Penangan Konflik;
8. Meningkatkan Pencegahan dan edukasi.

Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Kebijakan pada Renstra Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**TABEL 3.3 ARAH KEBIJAKAN RENSTRA**

| NO | OPERASIONALISASI NSPK | ARAH KEBIJAKAN RPJMD  | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD  |
|----|-----------------------|---|--|
| 1  | 2                     | 3   | 4  |
| 1  |                       | Meningkatkan pembangunan perdesaan mewujudkan desa mandiri                                  | Pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur desa<br><br>Peningkatan Peran Kecamatan  |
|    |                       | Optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia | Peningkatan dukungan kebijakan terhadap penyelenggaraan kegiatan keagamaan, aparatur dan masyarakat<br><br>Peningkatan pelestarian cagar budaya, adat istiadat, kearifan lokal |
|    |                       | Meningkatkan Ketentraman dan ketertiban masyarakat  | Pengembangan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang adaptif, kolaboratif dan sinergi antara lembaga keamanan dan penegakan hukum, masyarakat yang partisipatif         |

**BAB IV**  
**PROGRAM,KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA**  
**PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Maka Program Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar yang dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun ke depan dengan sumber dana APBN/APBD.

**4,1 Program,Kegiatan,Sub Kegiatan,Kinerja,Indikator,Target dan Pagu Indikatif**

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan penyelenggaraan administrasi, penataan kepegawaian dan administrasi keuangan secara efektif dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bontoharu di Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan/subkegiatan yaitu :

Kegiatan :

A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD

- C. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
  - a. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- D. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
  - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - b. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
  - c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - d. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
  - e. Bimbingan Tehnis Implementasi peraturan Perundang-undangan
- E. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
  - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - e. Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
  - a. Pengadaan Mebel
  - b. Pengadaan aset tetap lainnya
  - c. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
  - d. Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
  - e. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- G. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- H. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  - a. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - b. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
  - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - d. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau dinas jabatan
  - e. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD

## UNSUR KEWILAYAHAN

### 2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan bagi aparatur dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk pendukung terlaksananya pelayanan publik. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan / subkegiatan yaitu :

Kegiatan :

- A. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan;
  - a. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
- B. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
  - a. Peningkatan efektivitas kegiatan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan
  - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

### 3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah desanya. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan-kegiatan yaitu :

Kegiatan :

- A. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
  - a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
  - b. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
  - c. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- B. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
  - a. Fasilitasi pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
  - b. Penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan

- c. Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan
  - d. Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan
  - C. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
    - a. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
    - e. Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan
    - f. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
  - D. Koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM)
    - a. Penanganan covid-19 di Tingkat Desa/Kelurahan
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
- Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan Bontoharu. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan / subkegiatan yaitu :
- Kegiatan :
- A. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
    - a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
    - b. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
- Program ini dimaksudkan untuk terselenggaranya urusan pemerintahan secara umum yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Bontoharu. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan / subkegiatan yaitu :
- A. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah;
    - a. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
    - b. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional

- c. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
- d. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa
- e. Pengembangan kehidupan berdemokrasi berdasarkan Pancasila

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Program ini dimaksudkan untuk mengoordinasikan dan fasilitasi dan melakukan pembinaan serta pengawasan pemerintahan desa, baik dari segi pengelolaan pemerintahan, pengelolaan keuangan, perencanaan pembangunan, pembangunan kawasan, dan demikian pula dengan pula badan permusyawaratan desa. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan / subkegiatan yaitu :

- A. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
  - a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
  - b. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
  - c. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
  - d. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
  - e. Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
  - f. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
  - g. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
  - h. Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
  - i. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
  - j. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
  - k. Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan
  - l. Fasilitasi pelaksanaan Pilkades

**Tabel 4.1 PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN RENSTRA  
Kecamatan Bontoharu**

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN   | SASARAN  | OUTCOME (Program)                     | OUTPUT (Kegiatan)  | INDIKATOR  | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN                               | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--|--|---------------------------------------|--|--|---|------------|
| 1                                   | 2  | 3  | 4                                     | 5  | 6  | 7   | 8          |
|                                     | Meningkatkan kualitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan ketentraman masyarakat di Kecamatan melalui tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien |  |                                       |  | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Bontoharu |   |            |
|                                     |  | Terwujudnya pelayanan administrasi umum yang cepat, mudah dan akuntabel (S1) |                                       |  | Waktu rata-rata penyelesaian layanan administrasi (menit)                    |   |            |
|                                     |  |  | Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah |  | Persentase Capaian Realisasi Anggaran OPD                                    | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA |            |
|                                     |  |  |                                       | Persentase Capaian Kinerja Keuangan                      |  |   |            |
|                                     |  |  |                                       | Persentase Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kunci OPD |  |   |            |

|  |  |  |  |   |   |   |  |
|--|--|--|--|---|---|---|--|
|  |  |  |  | Terselenggaranya proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang tertib waktu untuk menjamin kepastian pelaksanaan program dan akuntabilitas kinerja organisasi | Persentase Penyusunan Dokumen Laporan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang di selesaikan tepat waktu | A Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      |  |
|  |  |  |  |   |   | a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |  |
|  |  |  |  |   |   | b Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |  |
|  |  |  |  |   |   | c Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |  |
|  |  |  |  |   |   | d Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |  |
|  |  |  |  |   |   | e Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |  |
|  |  |  |  |   |   | f Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |
|  |  |  |  |   |   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |
|  |  |  |  | Terselenggaranya Kepatuhan Penyampaian Laporan Keuangan yang Tepat Waktu sebagai Wujud Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan   | Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan yang tepat waktu   | B Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |  |
|  |  |  |  |   |   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |

|  |  |  |  |   |  |  |  |
|--|--|--|--|---|--|--|--|
|  |  |  |  |   |  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                  |  |
|  |  |  |  |   |  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               |  |
|  |  |  |  |   |  | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                      |  |
|  |  |  |  |   |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    |  |
|  |  |  |  |   |  | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                          |  |
|  |  |  |  |   |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD |  |
|  |  |  |  |   |  | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                 |  |
|  |  |  |  | Terselenggaranya Tertib Administrasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Guna Menunjang Optimalisasi Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah | Persentase Penyusunan dokumen Laporan Barang Milik Daerah yang tepat waktu | C Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                       |  |
|  |  |  |  |   |  | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                      |  |
|  |  |  |  |   |  | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD  |  |
|  |  |  |  |   |  | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                              |  |

|  |  |  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  |  |  | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD |  |
|  |  |  |  |  |  | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD     |  |
|  |  |  |  |  |  | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                           |  |
|  |  |  |  |  |  | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                                  |  |
|  |  |  |  | Terselenggaranya Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur guna mendukung efektivitas birokrasi dan akuntabilitas kinerja instansi | Persentase Aparatur yang di tingkatkan kualitas dan kapabilitasnya | D Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                           |  |
|  |  |  |  |  |  | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                     |  |
|  |  |  |  |  |  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                |  |
|  |  |  |  |  |  | Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian                    |  |
|  |  |  |  |  |  | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian               |  |
|  |  |  |  |  |  | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                   |  |
|  |  |  |  |  |  | Pemulangan Pegawai yang Pensiun                                       |  |
|  |  |  |  |  |  | Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas            |  |
|  |  |  |  |  |  | Pemindahan Tugas ASN  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |  |
|  |  |  |  |  |  | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                         |  |
|  |  |  |  |  |  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       |  |
|  |  |  |  | Terselenggaranya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Efektivitas dan Berkualitas | Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselenggarakan | E Administrasi Umum Perangkat Daerah                             |  |
|  |  |  |  |  |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |
|  |  |  |  |  |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |  |
|  |  |  |  |  |  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |  |
|  |  |  |  |  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |  |
|  |  |  |  |  |  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |  |
|  |  |  |  |  |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |  |
|  |  |  |  |  |  | Penyediaan Bahan/Material  |  |
|  |  |  |  |  |  | Fasilitasi Kunjungan Tamu  |  |
|  |  |  |  |  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD  |  |
|  |  |  |  |  |  | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD       |  |
|  |  |  |  | Tersedianya Barang Milik Daerah dalam Menunjang Kelancaran, Kualitas dan Efektivitas Urusan Pemerintahan | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan | F Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah           |  |
|  |  |  |  |  |  | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan            |  |
|  |  |  |  |  |  | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          |  |
|  |  |  |  |  |  | Pengadaan Mebel  |  |
|  |  |  |  |  |  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |  |
|  |  |  |  |  |  | Pengadaan Aset Tetap Lainnya   |  |
|  |  |  |  |  |  | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                |  |
|  |  |  |  |  |  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           |  |
|  |  |  |  |  |  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |  |
|  |  |  |  | Terselenggaranya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang Berkualitas                                     | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan                | G Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                       |  |

|  |  |  |   |  |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|--|
|  |  |  |   |  |  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |  |
|  |  |  |   |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                      |  |
|  |  |  |   |  |  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  |  |
|  |  |  |   |  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |  |
|  |  |  | Tersedianya Barang Milik Daerah yang Handal/Reliabel dalam Mendukung Pelayanan Publik | Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara |  | H Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      |  |
|  |  |  |   |  |  | Pemeliharaan Mebel   |  |
|  |  |  |   |  |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |  |
|  |  |  |   |  |  | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya  |  |
|  |  |  |   |  |  | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud   |  |
|  |  |  |   |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                 |  |
|  |  |  |   |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           |  |
|  |  |  |   |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |  |
|  |  |  |   |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah  |  |

|  |  |   |   |  |  |  |  |
|--|--|---|---|--|--|--|--|
|  |  |   |   |  |  | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan         |  |
|  |  | Menguatnya peran lembaga kemasyarakatan di tingkat Desa/ Kelurahan (S2) |   |  | Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang menerima pembinaan dan fasilitasi dari Kecamatan                                |  |  |
|  |  |   | Meningkatnya pelayanan publik yang akuntabel dan transparan |  | Persentase penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan kewenangan Kecamatan yang tepat waktu dan sesuai SOP | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>   |  |
|  |  |   |   | Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Persentase Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang diselenggarakan                              | A Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  |  |
|  |  |   |   |  |  | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |  |
|  |  |   |   |  |  | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan   |  |
|  |  |   |   | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan              | Persentase Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan  | B Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan       |  |

|  |  |  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  |  |  | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan   |  |
|  |  |  |  |  |  | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan   |  |
|  |  |  |  |  |  | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan  |  |
|  |  |  |  | Terselenggaranya Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum  | Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang diselenggarakan | B Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum   |  |
|  |  |  |  |  |  | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum |  |
|  |  |  |  |  |  | Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta  |  |
|  |  |  |  | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan   | C Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat   |  |
|  |  |  |  |  |  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha   |  |
|  |  |  |  |  |  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan  |  |

|  |  |  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|--|--|---|--|--|
|  |  |  |  |  |   | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan |  |
|  |  | Menguatnya peran lembaga kemsayarakatan di tingkat Desa/Kelurahan (S2) |  |  | Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang menerima pembinaan dan Fasilitasi dari Kecamatan             |  |  |
|  |  | Meningkatnya pembinaan terhadap UMKM di Wilayah Kecamatan (S3)         |  |  | Pertumbuhan Jumlah UMKM di wilayah Kecamatan  |  |  |
|  |  |  | <b>Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan</b> |  | <b>Persentase Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan</b>                          | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                            |  |
|  |  |  |  |  | <b>Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif</b>   |  |  |
|  |  |  |  |  | <b>Persentase Pembangunan/Rehabilitasi sarana prasarana lingkup kelurahan yang diselesaikan</b> |  |  |
|  |  |  |  |  | <b>Persentase masyarakat/kelompok masyarakat lingkup kelurahan yang mendapat pemberdayaan</b>   |  |  |

|  |  |  |  | Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Desa               | Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa yang di koordinasikan            | A Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  |  |
|--|--|--|--|---|--|--|--|
|  |  |  |  |   |  | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa  |  |
|  |  |  |  |   |  | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan |  |
|  |  |  |  |   |  | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  |  |
|  |  |  |  | Terselenggaranya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan          | Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                             | B Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  |  |
|  |  |  |  |   |  | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                       |  |
|  |  |  |  |   |  | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan   |  |
|  |  |  |  |   |  | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan   |  |
|  |  |  |  |   |  | Evaluasi Kelurahan   |  |
|  |  |  |  | Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang di berdayakan | C Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan  |  |

|  |  |   |  |   |   |  |   |
|--|--|---|--|---|---|--|---|
|  |  |   |  |   |   | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan   |   |
|  |  |   |  |   |   | Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan   |   |
|  |  |   |  |   |   | Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat   |   |
|  |  |   |  | Terselenggaranya Koordinasi dan Singkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat | Persentase Koordinasi dan Singkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat | D Koordinasi dan Singkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat   |   |
|  |  |   |  |   |   | Pencegahan Covid 19 di tingkat Desa/Kel  |   |
|  |  |   |  |   |   | Pembinaan Penanganan Covid 19 di tingkat Desa / Kel  |   |
|  |  |   |  | Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan        |   | E Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan  |   |
|  |  |   |  |   |   | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara |   |
|  |  | Meningkatnya koordinasi dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (FORKOPIMCAM) dalam menjaga stabilitas keamanan (S4) |  |   |   |  | Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan bersama Forkopimcam |

|  |  |  | Menurunnya Tingkat Kriminalitas di Wilayah Kecamatan |  | Tingkat Kriminalitas di Kecamatan per 1.000 penduduk   | PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | Tercapainya Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada masyarakat   | Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dikoordinasikan                     | A Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                      |  |
|  |  |  |  |  |  | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat   |  |
|  |  |  |  | Terselenggaranya penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dikoordinasikan (Penegakan PERDA) | Persentase penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dikoordinasikan | B Koordinasi penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah  |  |
|  |  |  |  |  |  | Koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |  |

|  |  | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan (S5) |   |   | Nilai SAKIP Kecamatan Bontoharu   |  |  |
|--|--|---|---|---|---|--|--|
|  |  |   | Menurunnya konflik sosial dan keagamaan |   | Persentase Anggaran Desa yang mendukung program pemerintah                              | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>  |  |
|  |  |   |   | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Yang diselenggarakan | Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Yang diselenggarakan | A Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah  |  |
|  |  |   |   |   |   | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |  |
|  |  |   |   |   |   | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional   |  |
|  |  |   |   |   |   | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa  |  |

|  |  |  |   |  |   |   |  |
|--|--|--|---|--|---|---|--|
|  |  |  |   |  |   | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional |  |
|  |  |  |   |  |   | Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan   |  |
|  |  |  |   |  |   | Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila  |  |
|  |  |  |   |  |   | Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal                              |  |
|  |  |  |   |  |   | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan  |  |
|  |  | Menguatnya peran lembaga kemsayarakatan di tingkat Desa/Kelurahan (S2) |   |  | Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang menerima pembinaan dan Fasilitasi dari Kecamatan |   |  |
|  |  |  | Meningkatnya dukungan Pemerintah Desa terhadap program pemerintah |  | Persentase Anggaran Desa yang mendukung program pemerintah                          | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>   |  |

|  |  |  |  | Terselenggaranya fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa i | Persentase fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang di fasilitasi | A Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |  |
|--|--|--|--|--|---|---|--|
|  |  |  |  |  |   | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa                      |  |
|  |  |  |  |  |   | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                      |  |
|  |  |  |  |  |   | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                    |  |
|  |  |  |  |  |   | Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan                     |  |
|  |  |  |  |  |   | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa                         |  |
|  |  |  |  |  |   | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa  |  |
|  |  |  |  |  |   | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa                  |  |
|  |  |  |  |  |   | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa                           |  |
|  |  |  |  |  |   | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa      |  |
|  |  |  |  |  |   | Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan                           |  |
|  |  |  |  |  |   | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                         |  |

|  |  |  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  |  |  | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan                              |  |
|  |  |  |  |  |  | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif  |  |
|  |  |  |  |  |  | Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga                                 |  |
|  |  |  |  |  |  | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa |  |
|  |  |  |  |  |  | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                |  |
|  |  |  |  |  |  | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya  |  |
|  |  |  |  |  |  | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan                               |  |
|  |  |  |  |  |  |   |  |

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

| Bidang urusan /program / Outcome/<br>kegiatan/Sub Kegiatan / output | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan<br>Kegiatan (Output)                             | Baseline<br>2024 | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                   |         |                   |         |                   |         |                   |         |                   |         |                   | Keterangan     |
|---|--|------------------|---------------------------------------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|----------------|
|   |  |                  | Tahun 0                               |                   | Tahun 1 |                   | Tahun 2 |                   | Tahun 3 |                   | Tahun 4 |                   | Tahun 5 |                   |                |
|   |  |                  | 2025                                  |                   | 2026    |                   | 2027    |                   | 2028    |                   | 2029    |                   | 2030    |                   |                |
|   |  |                  | Target                                | PAGU (Rp)         | Target  | PAGU (Rp)         | Target  | PAGU (Rp)         | Target  | PAGU (Rp)         | Target  | PAGU (Rp)         | Target  | PAGU (Rp)         |                |
| 1   | 2  | 3                | 4                                     | 5                 | 6       | 7                 | 8       | 9                 | 10      | 11                | 12      | 13                | 14      | 15                | 16             |
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br/>KAB/KOTA</b>    | Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah  |                  |                                       | 5.924.885.151     |         | 4.977.235.044     |         | 4.761.447.800     |         | 4.703.871.700     |         | 4.410.650.600     |         | 4.617.267.500     |                |
|   | Persentase Capaian Realisasi Anggaran OPD  | 95,11 %          | 96%                                   |                   | 96%     |                   | 97%     |                   | 98%     |                   | 98%     |                   | 99%     |                   |                |
|   | Persentase Capaian Kinerja Anggaran OPD  | 95,11 %          | 96%                                   |                   | 96%     |                   | 97%     |                   | 98%     |                   | 98%     |                   | 99%     |                   |                |
|   | Persentase Realisasi Capaian Indikator<br>Kinerja Kunci OPD                              | n/a              | 60%                                   |                   | 60%     |                   | 70%     |                   | 70%     |                   | 80%     |                   | 80%     |                   |                |
| <b>A</b>  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                      | 100%             | 100%                                  | <b>11.550.000</b> | 100%    | <b>15.999.000</b> | 100%    | <b>70.000.000</b> | 100%    | <b>70.000.000</b> | 100%    | <b>70.000.000</b> | 100%    | <b>91.000.000</b> |                |
| a   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                       | 2 Dok            | 3 dok                                 | 5.050.000         | 3 dok   | 3.999.000         | 2 dok   | 15.000.000        | 2 dok   | 15.000.000        | 2 dok   | 15.000.000        | 2 dok   | 26.000.000        | Kab. Kep. Slyr |
| b   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 1 Dok            | 1 Dok                                 | 0                 | 1 Dok   | 3.000.000         | 1 Dok   | 5.000.000         | 1 Dok   | 5.000.000         | 1 Dok   | 5.000.000         | 1 Dok   | 10.000.000        | Kab. Kep. Slyr |
| c   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD                                  | 1 Dok            | 1 Dok                                 | 0                 | 1 Dok   | 2.000.000         | 1 Dok   | 5.000.000         | 1 Dok   | 5.000.000         | 1 Dok   | 5.000.000         | 1 Dok   | 10.000.000        |                |
| d   | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   | 1 Dok            | 1 Dok                                 | 3.000.000         | 1 Dok   | 3.000.000         | 1 Dok   | 15.000.000        | 1 Dok   | 15.000.000        | 1 Dok   | 15.000.000        | 1 Dok   | 15.000.000        | Kab. Kep. Slyr |
| e   | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD  | 1 Dok            | 1 Dok                                 | 2.000.000         | 1 Dok   | 2.000.000         | 1 Dok   | 15.000.000        | 1 Dok   | 15.000.000        | 1 Dok   | 15.000.000        | 1 Dok   | 15.000.000        | Kab. Kep. Slyr |
| f   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 Dok            | 3 dok                                 | 1.500.000         | 3 dok   | 2.000.000         | 3 dok   | 15.000.000        | 3 dok   | 15.000.000        | 3 dok   | 15.000.000        | 3 dok   | 15.000.000        | Kab. Kep. Slyr |
|   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |                  |                                       |                   |         |                   |         |                   |         |                   |         |                   |         |                   |                |

Rencana Strategis (Renstra) 2025– 2029 Kecamatan Bontoharu

|   |  |  |                 |                 |               |                 |               |                 |               |                 |               |                 |               |                 |               |                |
|---|--|--|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| B | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan yang tepat waktu  | 100%            | 100%            | 4.093.079.000 | 100%            | 3.370.205.344 | 100%            | 3.601.447.800 | 100%            | 3.443.871.700 | 100%            | 3.250.650.600 | 100%            | 3.156.267.500 |                |
|   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Laporan Keuangan yang Tepat  | 26 Orang /Bulan | 26 Orang /Bulan | 2.721.195.000 | 26 Orang /Bulan | 2.737.345.544 | 26 Orang /Bulan | 3.561.447.800 | 28 Orang /Bulan | 3.403.871.700 | 30 Orang /Bulan | 3.210.650.600 | 30 Orang /Bulan | 3.116.267.500 | Kec. Bth       |
|   | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                  | Waktu  | 2 Dok           | 2 Dok           | 1.367.384.000 | 2 Dok           | 627.366.800   |                 |               |                 |               |                 |               |                 |               |                |
|   | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               |  |                 |                 |               |                 |               |                 |               |                 |               |                 |               |                 |               |                |
|   | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                      |  |                 |                 |               |                 |               |                 |               |                 |               |                 |               |                 |               |                |
|   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   | 1 Laporan       | 1 Lap           | 4.500.000     | 1 Lap           | 3.493.000     | 1 Lap           | 15.000.000    | 1 Lap           | 15.000.000    | 1 Lap           | 15.000.000    | 1 Lap           | 15.000.000    | Kab. Kep. Slyr |
|   | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                          |  |                 |                 |               |                 |               |                 |               |                 |               |                 |               |                 |               |                |
|   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD (Laporan Keuangan Triwulan dan RFK) | 16 Laporan      | 16 Lap          | 0             | 16 Lap          | 2.000.000     | 16 Lap          | 25.000.000    | 16 Lap          | 25.000.000    | 16 Lap          | 25.000.000    | 16 Lap          | 25.000.000    | Kab. Kep. Slyr |
|   | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                 |  |                 |                 |               |                 |               |                 |               |                 |               |                 |               |                 |               |                |
| C | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                         | Persentase Peyusunan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang Tepat Waktu   | 100%            | 100%            | 2.000.000     | 100%            | 2.500.000     | 100%            | 15.000.000    | 100%            | 15.000.000    | 100%            | 15.000.000    | 100%            | 20.000.000    |                |
|   | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                      |  |                 |                 |               |                 |               |                 |               |                 |               |                 |               |                 |               |                |
|   | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD  |  |                 |                 |               |                 |               |                 |               |                 |               |                 |               |                 |               |                |
|   | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                              |  |                 |                 |               |                 |               |                 |               |                 |               |                 |               |                 |               |                |
|   | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD          |  |                 |                 |               |                 |               |                 |               |                 |               |                 |               |                 |               |                |
|   | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD              | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 4 Laporan       | 4 Lap           | 2.000.000     | 4 Lap           | 2.500.000     | 4 Lap           | 15.000.000    | 4 Lap           | 15.000.000    | 4 Lap           | 15.000.000    | 4 Lap           | 20.000.000    | Kab. Kep. Slyr |
|   | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    |  |                 |                 |               |                 |               |                 |               |                 |               |                 |               |                 |               |                |
|   | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD   |  |                 |                 |               |                 |               |                 |               |                 |               |                 |               |                 |               |                |

Rencana Strategis (Renstra) 2025– 2029 Kecamatan Bontoharu

|   |  |  |            |            |             |           |             |         |             |          |             |         |             |          |             |               |
|---|--|--|------------|------------|-------------|-----------|-------------|---------|-------------|----------|-------------|---------|-------------|----------|-------------|---------------|
| D | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Persentase Aparatur yang di tingkatkan Kualitas dan Kapabilitasnya                     | 100%       | 100%       | 5.300.000   | 100%      | 6.360.000   | 100%    | 82.000.000  | 100%     | 96.000.000  | 100%    | 96.000.000  | 100%     | 130.000.000 |               |
|   | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                |  |            |            |             |           |             |         |             |          |             |         |             |          |             |               |
|   | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                              | Paket      | Paket      | 0           | Paket     | 0           | Paket   | 0           | 14 Paket | 14.000.000  |         | -           | 14 Paket | 14.000.000  | Kec. Bth      |
|   | Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian               | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian                      | 1 Dok      | 1 Dok      | 5.300.000   | 1 Dok     | 6.360.000   | 1 Dok   | 16.000.000  | 1 Dok    | 16.000.000  | 1 Dok   | 30.000.000  | 1 Dok    | 30.000.000  | Kec. Bth      |
|   | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian          | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian           | 1 Dok      | 1 Dok      | 0           | 1 Dok     | 0           | 1 Dok   | 6.000.000   | 1 Dok    | 6.000.000   | 1 Dok   | 6.000.000   | 1 Dok    | 6.000.000   | Kec. Bth      |
|   | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              |  |            |            |             |           |             |         |             |          |             |         |             |          |             |               |
|   | Pemulangan Pegawai yang Pensiun                                  |  |            |            |             |           |             |         |             |          |             |         |             |          |             |               |
|   | Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas       |  |            |            |             |           |             |         |             |          |             |         |             |          |             |               |
|   | Pemindahan Tugas ASN   |  |            |            |             |           |             |         |             |          |             |         |             |          |             |               |
|   | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan    | Orang      | 5 Orang    | 0           | 5 Orang   | 0           | 5 Orang | 50.000.000  | 5 Orang  | 50.000.000  | 5 Orang | 50.000.000  | 7 Orang  | 70.000.000  | Prov. Sul Sel |
|   | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                         |  |            |            |             |           |             |         |             |          |             |         |             |          |             |               |
|   | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Orang      | 1 Orang    | 0           | 1 Orang   | 0           | 1 Orang | 10.000.000  | 1 Orang  | 10.000.000  | 1 Orang | 10.000.000  | 1 Orang  | 10.000.000  | Prov. Sul Sel |
| E | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat daerah yang di selenggarakan            | 100%       | 100%       | 246.664.900 | 100%      | 177.193.000 | 100%    | 219.000.000 | 100%     | 219.000.000 | 100%    | 219.000.000 | 100%     | 250.000.000 |               |
|   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |            |            |             |           |             |         |             |          |             |         |             |          |             |               |
|   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |  |            | 46.982.600 |             | 8.352.000 |             |         |             |          |             |         |             |          |             |               |
|   | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |  |            |            |             |           |             |         |             |          |             |         |             |          |             |               |
|   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |  |            |            |             |           |             |         |             |          |             |         |             |          |             |               |
|   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 2 Paket    | 2 Paket    | 7.388.300   | 2 Paket   | 7.325.000   | 2 Paket | 15.000.000  | 2 Paket  | 15.000.000  | 2 Paket | 15.000.000  | 2 Paket  | 20.000.000  | Kec. Bth      |
|   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |  |            |            |             |           |             |         |             |          |             |         |             |          |             |               |
|   | Penyediaan Bahan/Material  |  |            |            |             |           |             |         |             |          |             |         |             |          |             |               |
|   | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   | 12 Laporan | 12 Lap     | 6.000.000   | 12 Lap    | 6.000.000   | 12 Lap  | 24.000.000  | 12 Lap   | 24.000.000  | 12 Lap  | 24.000.000  | 12 Lap   | 30.000.000  | Kec. Bth      |
|   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Laporan    | 700 Lap    | 186.294.000 | 700 Lap   | 155.516.000 | 700 Lap | 180.000.000 | 700 Lap  | 180.000.000 | 700 Lap | 180.000.000 | 800 Lap  | 200.000.000 | Kec. Bth      |

Rencana Strategis (Renstra) 2025– 2029 Kecamatan Bontoharu

|   |  |  |           |         |               |         |               |         |             |         |             |         |             |         |             |          |
|---|--|--|-----------|---------|---------------|---------|---------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|----------|
|   | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD  |  |           |         |               |         |               |         |             |         |             |         |             |         |             |          |
|   | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD       |  |           |         |               |         |               |         |             |         |             |         |             |         |             |          |
| F | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah             | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan                                     | 100%      | 100%    | 40.298.200    | 100%    | 17.422.000    | 100%    | 160.000.000 | 100%    | 240.000.000 | 100%    | 100.000.000 | 100%    | 150.000.000 |          |
|   | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan            |  |           |         |               |         |               |         |             |         |             |         |             |         | Kec. Bth    |          |
|   | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          | Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   |           | 0       | -             | 0       | -             | 4 Unit  | 140.000.000 | 4 Unit  | 140.000.000 |         |             |         |             |          |
|   | Pengadaan Mebel  |  |           |         |               |         |               |         |             |         |             |         |             |         |             |          |
|   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  | Unit      | 4 Unit  | 40.298.200    | 4 Unit  | 17.422.000    | 4 Unit  | 20.000.000  | 10 Unit | 80.000.000  | 10 Unit | 80.000.000  | 10 Unit | 120.000.000 | Kec. Bth |
|   | Pengadaan Aset Tetap Lainnya   |  |           |         |               |         |               |         |             |         |             |         |             |         |             |          |
|   | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                |  |           |         |               |         |               |         |             |         |             |         |             |         |             |          |
|   | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                       | Unit      | Unit    | 0             | Unit    | 0             | Unit    | 0           | 1 Unit  | 20.000.000  | Unit    |             | Unit    | 20.000.000  | Kec. Bth |
|   | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan             | Unit      | Unit    | 0             | Unit    | 0             | Unit    | 0           | Unit    |             | 1 Unit  | 20.000.000  | Unit    | 10.000.000  | Kec. Bth |
| G | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan  | 100%      | 100%    | 1.266.214.651 | 100%    | 1.261.317.700 | 100%    | 390.000.000 | 100%    | 390.000.000 | 100%    | 390.000.000 | 100%    | 400.000.000 |          |
|   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Kebutuhan Jasa Penunjang   |           |         |               |         |               |         |             |         |             |         |             |         |             |          |
|   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Urusan Pemerintahan  | 3 Laporan | 3 Lap   | 58.029.151    | 3 Lap   | 48.967.900    | 3 Lap   | 50.000.000  | 3 Lap   | 50.000.000  | 3 Lap   | 50.000.000  | 3 Lap   | 50.000.000  | Kec. Bth |
|   | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            |  |           |         |               |         |               |         |             |         |             |         |             |         |             |          |
|   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (ATK, Belanja Makan Minum , Honor PHL dan BPJS) | 4 Laporan | 4 Lap   | 1.208.185.500 | 4 Lap   | 1.212.349.800 | 4 Lap   | 340.000.000 | 4 Lap   | 340.000.000 | 4 Lap   | 340.000.000 | 4 Lap   | 350.000.000 | Kec. Bth |
| H | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah        | Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara   | 100%      | 100%    | 259.778.400   | 100%    | 126.238.000   | 100%    | 224.000.000 | 100%    | 230.000.000 | 100%    | 270.000.000 | 100%    | 420.000.000 |          |
|   | Pemeliharaan Mebel   |  |           |         |               |         |               |         |             |         |             |         |             |         |             |          |
|   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Pemeliharaan Laptop dan Printer)                                 | 22 Unit   | 23 Unit | 23.170.000    | 23 Unit | 18.582.000    | 25 Unit | 20.000.000  | 25 Unit | 20.000.000  | 25 Unit | 20.000.000  | 25 Unit | 20.000.000  | Kec. Bth |
|   | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya  | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara  | 7 Unit    | 9 Unit  | 3.050.000     | 9 Unit  | 3.660.000     | 9 Unit  | 20.000.000  | 9 Unit  | 20.000.000  | 9 Unit  | 20.000.000  | 9 Unit  | 20.000.000  | Kec. Bth |
|   | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud   |  |           |         |               |         |               |         |             |         |             |         |             |         |             |          |

Rencana Strategis (Renstra) 2025– 2029 Kecamatan Bontoharu

|  |  |           |         |             |         |            |         |             |         |             |         |             |         |             |          |
|--|--|-----------|---------|-------------|---------|------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|----------|
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   | 3 Unit    | 3 Unit  | 132.448.400 | 3 Unit  | 24.458.000 | 3 Unit  | 54.000.000  | 3 Unit  | 60.000.000  | 3 Unit  | 100.000.000 | 3 Unit  | 225.000.000 | Kec. Bth |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 |  |           |         |             |         |            |         |             |         |             |         |             |         |             |          |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       |  |           |         |             |         |            |         |             |         |             |         |             |         |             |          |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah  |  |           |         |             |         |            |         |             |         |             |         |             |         |             |          |
| Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                     | 19 Unit   | 19 unit | 101.110.000 | 19 unit | 79.538.000 | 19 unit | 130.000.000 | 19 unit | 130.000.000 | 23 unit | 130.000.000 | 23 unit | 155.000.000 | Kec. Bth |
| UNSUR KEWILAYAHAN  |  |           |         |             |         |            |         |             |         |             |         |             |         |             |          |
| KECAMATAN  |  |           |         |             |         |            |         |             |         |             |         |             |         |             |          |
| <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYAN PUBLIK</b>   | Meningkatnya pelayanan publik yang akuntabel dan transparan  |           |         | 42.504.300  |         | 29.930.000 |         | 89.089.400  |         | 93.655.300  |         | 94.928.000  |         | 100.526.000 |          |
|  | Persentase penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan kewenangan kecamatan yang tepat waktu dan sesuai SOP         | 95%       | 96%     |             | 96%     |            | 97%     |             | 98%     |             | 99%     |             | 100%    |             |          |
| A  | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  | 100%      | 100%    | 38.494.500  | 100%    | 23.620.000 | 100%    | 34.089.400  | 100%    | 45.655.300  | 100%    | 44.928.000  | 100%    | 45.526.000  |          |
|  | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan | 1 Lap   | 35.504.500  | 1 Lap   | 21.120.000 | 1 Lap   | 20.000.000  | 1 Lap   | 25.655.300  | 1 Lap   | 24.928.000  | 1 Lap   | 25.526.000  | Kec. Bth |
|  | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan   | 1 Dok     | 1 Dok   | 2.990.000   | 1 Dok   | 2.500.000  | 1 Dok   | 14.089.400  | 1 Dok   | 20.000.000  | 1 Dok   | 20.000.000  | 1 Dok   | 20.000.000  | Kec. Bth |
| B  | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan         | 100%      | 100%    | -           | 100%    | -          | 100%    | 45.000.000  | 100%    | 38.000.000  | 100%    | 35.000.000  | 100%    | 40.000.000  |          |
|  | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan  |           |         | 0           |         | 0          |         | 0           |         |             |         |             |         |             |          |
|  | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan  | 1 Laporan | 1 Lap   | 0           | 1 Lap   | -          | 1 Lap   | 25.000.000  | 1 Lap   | 18.000.000  | 1 Lap   | 15.000.000  | 1 Lap   | 20.000.000  | Kec. Bth |

Rencana Strategis (Renstra) 2025– 2029 Kecamatan Bontoharu

|   |   |   |           |        |             |       |               |       |               |       |               |       |             |       |             |          |
|---|---|---|-----------|--------|-------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|-------------|----------|
|   | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan  | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Penyusunan Laporan Penduduk) | 1 Laporan | 1 Lap  | 0           | 1 Lap | -             | 1 Lap | 20.000.000    | 1 Lap | 20.000.000    | 1 Lap | 20.000.000  | 1 Lap | 20.000.000  | Kec. Bth |
| B   | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum   | Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang diselenggarakan  |           |        | -           |       | -             |       | -             |       | 0             |       | 0           |       | 0           |          |
|   | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum |   |           |        | 0           |       | 0             |       | 0             |       | 0             |       | 0           |       | 0           |          |
|   | Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta  |   |           |        | 0           |       | 0             |       | 0             |       | 0             |       | 0           |       | 0           |          |
| C   | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat   | Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan  | 100%      | 100%   | 4.009.800   | 100%  | 3.000.000     | 100%  | 10.000.000    | 100%  | 10.000.000    | 100%  | 15.000.000  | 100%  | 15.000.000  |          |
|   | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha   |   |           |        | 0           |       | 0             |       | 0             |       | 0             |       | 0           |       | 0           |          |
|   | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan  |   |           |        | 0           |       | 0             |       | 0             |       | 0             |       | 0           |       | 0           |          |
|   | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan  | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Penyusunan Propil)   | 1 Laporan | 1 Lap  | 4.009.800   | 1 Lap | 6.310.000     | 1 Lap | 10.000.000    | 1 Lap | 10.000.000    | 1 Lap | 15.000.000  | 1 Lap | 15.000.000  | Kec. Bth |
| <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b> |   | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan   |           |        | 656.559.799 |       | 1.862.860.456 |       | 1.348.709.300 |       | 1.171.088.300 |       | 960.734.300 |       | 833.026.200 |          |
|   |   | Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan   | 66,6 %    | 70,00% |             | 77,7% |               | 77,7% |               | 88,8% |               | 88,8% |             | 88,8% |             |          |
|   |   | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif  | 75%       | 80%    |             | 80%   |               | 80%   |               | 85%   |               | 90%   |             | 95%   |             |          |
|   |   | Persentase pembangunan/rehabitasi sarana prasarana lingkup kelurahan yang diselesaikan  | 98%       | 100%   |             | 100%  |               | 100%  |               | 100%  |               | 100%  |             | 100%  |             |          |
|   |   | Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan  | 75%       | 80%    |             | 80%   |               | 85%   |               | 90%   |               | 95%   |             | 100%  |             |          |
| A   | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa   | Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa yang di koordinasikan   | 100%      | 100%   | 114.070.700 | 100%  | 145.994.256   | 100%  | 95.000.000    | 100%  | 35.000.000    | 100%  | 35.000.000  | 100%  | 25.000.000  |          |
|   | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa   |   |           |        | -           |       | -             |       | -             |       | -             |       | -           |       | -           |          |

Rencana Strategis (Renstra) 2025– 2029 Kecamatan Bontoharu

|  |  |             |             |                    |             |                      |             |                      |             |                    |             |                    |             |                    |          |
|--|--|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|----------|
| Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Pembinaan dan Asistensi APBDes) | 2 Dok       | 2 Dok       | 7.847.000          | 2 Dok       | 18.000.000           | 2 Keg       | 30.000.000           | 2 Keg       | 10.000.000         | 2 Keg       | 10.000.000         | 2 Keg       | 10.000.000         | Kec. Bth |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  | Jumlah Laporan peningkatan efektifitas pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan (Pembinaan Kampung KB dan penanganan Stunting)   | 2 Lap       | 2 Lap       | 106.305.700        | 2 Lap       | 127.994.256          | 1 Keg       | 65.000.000           | 1 Keg       | 25.000.000         | 1 Keg       | 25.000.000         | 1 Keg       | 15.000.000         | Kec. Bth |
| <b>B Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>   | <b>Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>  | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>542.489.099</b> | <b>100%</b> | <b>1.513.866.200</b> | <b>100%</b> | <b>1.050.709.300</b> | <b>100%</b> | <b>911.088.300</b> | <b>100%</b> | <b>750.734.500</b> | <b>100%</b> | <b>573.026.200</b> |          |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                       | Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan ( Musrenbang Kelurahan)  | 7 LK        | 7 LK        | 20.188.050         | 7 LK        | 5.143.000            |             | 20.000.000           |             | 20.000.000         |             | 20.000.000         |             | 20.000.000         | Kec. Bth |
| Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan   | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun   | 20 Unit     | 20 Unit     | 468.877.249        | 20 Unit     | 1.408.047.200        |             | 1.000.709.300        |             | 871.088.300        |             | 710.734.500        |             | 533.026.200        | Kec. Bth |
| Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan   | Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan   | Pokmas      | Pok mas     | 53.423.800         | Pok mas     | 90,676,000           |             | 20.000.000           |             | 10.000.000         |             | 10.000.000         |             | 10.000.000         | Kec. Bth |
| Evaluasi Kelurahan   | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan  | Lap         | Lap         | -                  | Lap         | 10.000.000           |             | 10.000.000           |             | 10.000.000         |             | 10.000.000         |             | 10.000.000         | Kec. Bth |
| <b>C Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>   | <b>Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang di berdayakan</b>  | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>-</b>           | <b>100%</b> | <b>93.000.000</b>    | <b>100%</b> | <b>93.000.000</b>    | <b>100%</b> | <b>115.000.000</b> | <b>100%</b> | <b>65.000.000</b>  | <b>100%</b> | <b>85.000.000</b>  |          |
| Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan   | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan   | 1 LK        | 1 LK        | 0                  | 1 LK        | 10.000.000           | 1 Keg       | 10.000.000           | 1 Keg       | 10.000.000         | 1 Keg       | 10.000.000         | 1 Keg       | 20.000.000         | Kec. Bth |
| Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan   | Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang disediakan   | Unit        | 1 Keg       | 0                  | 1 Keg       | 78.000.000           | 1 Keg       | 78.000.000           | 1 Keg       | 100.000.000        | 1 Keg       | 50.000.000         | 1 Keg       | 60.000.000         | Kec. Bth |
| Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat   | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (fasilitasi pengembangan Ekonomi masyarakat Pesisir)   | 1 Lap       | 1 Lap       | 0                  | 1 Lap       | 5.000.000            | 1 Keg       | 5.000.000            | 1 Keg       | 5.000.000          | 1 Keg       | 5.000.000          | 1 Keg       | 5.000.000          | Kec. Bth |
| <b>D Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat</b>   | <b>Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat</b>  | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>-</b>           | <b>100%</b> | <b>10.000.000</b>    | <b>100%</b> | <b>10.000.000</b>    | <b>-</b>    | <b>-</b>           | <b>-</b>    | <b>-</b>           | <b>-</b>    | <b>-</b>           |          |
| Pencegahan Covid 19 di tingkat Desa/Kel  | Jumlah Dokumen Pencegahan Covid 19 di tingkat Desa/Kel   | 1 Dok       | 1 Dok       | 0                  | 1 Dok       | 5.000.000            | 1 Keg       | 5.000.000            | 1 Keg       | 0                  | 1 Keg       | 0                  | 1 Keg       | 0                  | Kec. Bth |
| Pembinaan Penanganan Covid 19 di tingkat Desa / Kel  | Jumlah Dokumen Pembinaan Covid 19 di tingkat Desa/Kel  | 1 Dok       | 1 Dok       | 0                  | 1 Dok       | 5.000.000            | 1 Keg       | 5.000.000            | 1 Keg       | 0                  | 1 Keg       | 0                  | 1 Keg       | 0                  | Kec. Bth |

Rencana Strategis (Renstra) 2025– 2029 Kecamatan Bontoharu

|   |  |  |          |          |            |          |             |       |             |       |             |       |             |       |             |          |
|---|--|--|----------|----------|------------|----------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|----------|
| E   | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan  | Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan   | 100%     | 100%     | -          | 100%     | 100.000.000 | 100%  | 100.000.000 | 100%  | 110.000.000 | 100%  | 110.000.000 | 100%  | 150.000.000 |          |
|   | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara | Jumlah Keluarga yang mengikuti Pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga (Kegiatan PKK)   | Keluarga | Keluarga | 0          | Keluarga | 100.000.000 | 1 Keg | 100.000.000 | 1 Keg | 110.000.000 | 1 Keg | 110.000.000 | 1 Keg | 150.000.000 | Kec. Bth |
| <b>PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>          |  | Menurunnya tingkat kriminalitas di Wilayah Kecamatan   |          |          | 28.129.200 |          | 39.631.000  |       | 272.965.400 |       | 293.607.500 |       | 392.289.400 |       | 503.361.100 |          |
|   |  | Tingkat Kriminalitas di Kecamatan per 1.000 penduduk   | 1,1      | 0,80     |            | 0,75     |             | 0,7   |             | 0,6   |             | 0,5   |             | 0,4   |             |          |
| A   | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum  | Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dikoordinasikan   | 100%     | 100%     | 27.473.200 | 100%     | 35.631.000  | 100%  | 262.965.400 | 100%  | 273.607.500 | 100%  | 352.289.400 | 100%  | 463.361.100 |          |
|   | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan  | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan   | 1 Lap    | 1 Lap    | 24.023.200 | 1 Lap    | 26.328.000  | 1 Lap | 30.000.000  | 1 Lap | 30.000.000  | 1 Lap | 60.000.000  | 1 Lap | 60.000.000  | Kec. Bth |
|   | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat  | 1 Lap    | 1 Lap    | 0          | 1 Lap    | 9.303.000   | 1 Lap | 232.965.400 | 1 Lap | 243.607.500 | 1 Lap | 292.289.400 | 1 Lap | 403.361.100 | Kec. Bth |
| B   | Koordinasi penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah  | Persentase penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dikoordinasikan   | 100%     | 100%     | 4.106.000  | 100%     | 4.000.000   | 100%  | 10.000.000  | 100%  | 20.000.000  | 100%  | 40.000.000  | 100%  | 40.000.000  |          |
|   | Koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                             | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/ sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Penertiban ternak dll) | 1 Lap    | 1 Lap    | 4.106.000  | 1 Lap    | 4.000.000   | 1 Lap | 10.000.000  | 1 Lap | 20.000.000  | 1 Lap | 40.000.000  | 1 Lap | 40.000.000  | Kec. Bth |
| <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b> |  | Menurunnya konflik sosial dan keagamaan  |          |          | 54.057.150 |          | 60.875.500  |       | 82.134.100  |       | 79.063.300  |       | 73.714.900  |       | 72.465.500  |          |
|   |  | Jumlah konflik berlatar belakang sosial dan keagamaan di wilayah Kecamatan   | 2        | 2        |            | 2        |             | 2     |             | 1     |             | 1     |             | 0     |             |          |

Rencana Strategis (Renstra) 2025– 2029 Kecamatan Bontoharu

|   |  |   |           |           |                   |           |                   |                   |                    |           |                    |           |                    |                    |                    |          |                    |  |  |                    |
|---|--|---|-----------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|--|--|--------------------|
| A   | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah  | Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Yang diselenggarakan   | 100%      | 100%      | 54.057.150        | 100%      | 60.875.500        | 100%              | 82.134.100         | 100%      | 79.063.300         | 100%      | 73.714.900         | 100%               | 72.465.500         |          |                    |  |  |                    |
|   | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kegiatan HUT dan Hari Jadi) | 300 orang | 300 Orang | 33.144.950        | 300 Orang | 23.000.000        | 300 Orang         | 42.134.100         | 300 Orang | 40.063.300         | 300 Orang | 38.714.900         | 300 Orang          | 37.465.500         | Kec. Bth |                    |  |  |                    |
|   | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional   |   |           |           |                   |           |                   |                   |                    |           |                    |           |                    |                    |                    |          |                    |  |  |                    |
|   | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa  |   |           |           |                   |           |                   |                   |                    |           |                    |           |                    |                    |                    |          |                    |  |  |                    |
|   | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional  | Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Kegiatan MTQ/STQ)  | 150 Orang | 150 Orang | 20.912.200        | 150 Orang | 27.875.500        | 150 Orang         | 30.000.000         | 150 Orang | 30.000.000         | 150 Orang | 30.000.000         | 150 Orang          | 30.000.000         | Kec. Bth |                    |  |  |                    |
|   | Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan  |   |           |           |                   |           |                   |                   |                    |           |                    |           |                    |                    |                    |          |                    |  |  |                    |
|   | Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila   |   |           |           |                   |           |                   |                   |                    |           |                    |           |                    |                    |                    |          |                    |  |  |                    |
|   | Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal   |   |           |           |                   |           |                   |                   |                    |           |                    |           |                    |                    |                    |          |                    |  |  |                    |
|   | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan   | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan   | 20 Orang  | 20 Orang  | -                 | 20 Orang  | 10.000.000        | 20 Orang          | 10.000.000         | 20 Orang  | 9.000.000          | 20 Orang  | 5.000.000          | 20 Orang           | 5.000.000          | Kec. Bth |                    |  |  |                    |
| <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b> |  | Meningkatnya dukungan pemerintah desa terhadap Program pemerintah   |           |           | <b>85.490.900</b> |           |                   | <b>91.186.000</b> |                    |           | <b>145.816.800</b> |           |                    | <b>153.899.100</b> |                    |          | <b>144.760.700</b> |  |  | <b>150.995.200</b> |
|   |  | Persentase Anggaran Desa yang mendukung program pemerintah  | 60%       | 62%       |                   | 65%       |                   | 70%               |                    | 75%       |                    | 80%       |                    | 85%                |                    |          |                    |  |  |                    |
| A   | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa  | Persentase fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang di fasilitasi   | 100%      | 100%      | <b>85.490.900</b> | 100%      | <b>91.186.000</b> | 100%              | <b>145.816.800</b> | 100%      | <b>153.899.100</b> | 100%      | <b>144.760.700</b> | 100%               | <b>150.995.200</b> | Kec. Bth |                    |  |  |                    |
|   | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa   | Jumlah Dokumen yang di fasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa  | 1 Dok     | 1 Dok     | -                 | 1 Dok     | -                 | 1 Dok             | 6.000.000          | 1 Dok     | 7.000.000          | 1 Dok     | 7.000.000          | 1 Dok              | 7.000.000          | Kec. Bth |                    |  |  |                    |

Rencana Strategis (Renstra) 2025– 2029 Kecamatan Bontoharu

|   |   |       |       |            |       |            |       |            |       |            |       |            |       |            |          |
|---|---|-------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|----------|
| Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa  | Jumlah Dokumen yang di fasilitasi dalam rangka Administrasi tata pemerintahan desa (Lomba Desa/Kel)                                 | 1 Dok | 1 Dok | 0          | 1 Dok | 20.000.000 | 1 Dok | 19.816.800 | 1 Dok | 19.899.100 | 1 Dok | 20.760.700 | 1 Dok | 20.995.200 | Kec. Bth |
| Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa  | Jumlah Dokumen yang di fasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan dan aset desa dan pendayagunaan aset desa                       | 1 Dok | 1 Dok | -          | 1 Dok | -          | 1 Dok | 10.000.000 | 1 Dok | 10.000.000 | 1 Dok | 10.000.000 | 1 Dok | 10.000.000 | Kec. Bth |
| Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan   |   |       |       |            |       |            |       |            |       |            |       |            |       |            |          |
| Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa   | Jumlah dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa  | 1 Dok | 1 Dok | -          | 1 Dok | -          | 1 Dok | -          | 1 Dok | 10.000.000 | 1 Dok | 10.000.000 | 1 Dok | 10.000.000 |          |
| Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa  | Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa  |       | 0     | -          | 0     | -          | 1 Dok | 20.000.000 |       | -          |       | -          |       | -          |          |
| Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa  | Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa   | 1 Dok | 1 Dok | -          | 1 Dok | -          | 1 Dok | 10.000.000 | 1 Dok | 10.000.000 | 1 Dok | 10.000.000 | 1 Dok | 10.000.000 | Kec. Bth |
| Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa   |   | 1 Dok | 1 Dok | -          | 1 Dok | -          | 1 Dok | 5.000.000  | 1 Dok | 5.000.000  | 1 Dok | 5.000.000  | 1 Dok | 5.000.000  |          |
| Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Pendataan obyek dan subyek pajak yang akurat) | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Pendataan obyek dan subyek pajak yang akurat)   | 1 Dok | 1 Dok | -          | 1 Dok | 18.150.500 | 1 Dok | 10.000.000 | 1 Dok | 10.000.000 | 1 Dok | 10.000.000 | 1 Dok | 12.000.000 | Kec. Bth |
| Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan   | Jumlah dokumen fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan  | 1 Dok | 1 Dok | 0          | 1 Dok | 0          | 1 Dok | 13.000.000 | 1 Dok | 20.000.000 | 1 Dok | 10.000.000 | 1 Dok | 10.000.000 | Kec. Bth |
| Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteriban Umum  |   |       |       | 8.809.000  |       | 9.987.500  |       |            |       |            |       |            |       |            |          |
| Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan  | Jumlah dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan   | 1 Dok | 1 Dok | 53.934.000 | 1 Dok | 22.998.000 | 1 Dok | 20.000.000 | 1 Dok | 20.000.000 | 1 Dok | 20.000.000 | 1 Dok | 20.000.000 | Kec. Bth |
| Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif  | Jumlah dokumen Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Musrenbang Kecamatan)                                    | 1 Dok | 1 Dok | 8.999.800  | 1 Dok | 9.000.000  | 1 Dok | 16.000.000 | 1 Dok | 16.000.000 | 1 Dok | 16.000.000 | 1 Dok | 16.000.000 | Kec. Bth |
| Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga   |   |       |       |            |       |            |       |            |       |            |       |            |       |            |          |
| Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa                       | Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | 1 Dok | 1 Dok |            | 1 Dok | 0          | 1 Dok | 3.000.000  | 1 Dok | 3.000.000  | 1 Dok | 3.000.000  | 1 Dok | 7.000.000  | Kec. Bth |

*Rencana Strategis (Renstra) 2025– 2029 Kecamatan Bontoharu*

|  |   |       |       |                      |                      |           |                      |            |                      |            |                      |            |                      |            |          |
|--|---|-------|-------|----------------------|----------------------|-----------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------|
| Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 1 Dok | 1 Dok | 6.999.800            | 1 Dok                | 7.000.000 | 1 Dok                | 10.000.000 | 1 Dok                | 10.000.000 | 1 Dok                | 10.000.000 | 1 Dok                | 10.000.000 | Kec. Bth |
| Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya   |   |       |       |                      |                      |           |                      |            |                      |            |                      |            |                      |            |          |
| Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan                | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan          | 1 Lap | 1 Lap | 6.748.300            | 1 Lap                | 4.050.000 | 1 Lap                | 3.000.000  | 1 Lap                | 13.000.000 | 1 Lap                | 13.000.000 | 1 Lap                | 13.000.000 | Kec. Bth |
|  |   |       |       | <b>6.791.735.500</b> | <b>7.061.718.000</b> |           | <b>6.700.162.800</b> |            | <b>6.495.185.200</b> |            | <b>6.077.078.100</b> |            | <b>6.277.641.500</b> |            |          |

**4.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung Program**

**Prioritas Pembangunan Daerah**

Peran perencanaan dalam pembangunan sangatlah penting, untuk itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, masing – masing dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2025 – 2029 yang diukur berdasarkan indikator kinerja, untuk itu dalam pelaksanaannya kinerja Kecamatan Bontoharu berkontribusi secara langsung terhadap penetapan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Penetapan kinerja organisasi dilakukan guna mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Bontoharu, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan di Kecamatan Bontoharu yang memberikan arah terhadap rencana pembangunan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2029.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah dapat dilihat pada table di bawah ini :

**Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

| NO | PROGRAM PRIORITAS   | OUTCOME   | KEGIATAN/SUB KEGIATAN  | KET. |
|----|---|---|--|------|
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5    |
| 1  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Meningkatnya pelayanan publik yang akuntabel dan transparan | A Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  |      |
|    |   |   | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |      |
|    |   |   | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan   |      |
|    |   |   | B Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan       |      |
|    |   |   | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan  |      |
|    |   |   | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan  |      |
|    |   |   | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                       |      |
|    |   |   | C Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum  |      |

|   |  |   |  |  |
|---|--|---|--|--|
|   |  |   | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum  |  |
|   |  |   | Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta   |  |
|   |  |   | D Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat  |  |
|   |  |   | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha  |  |
|   |  |   | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan   |  |
|   |  |   | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan   |  |
| 2 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN DAN KELURAHAN | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | A Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  |  |
|   |  |   | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa  |  |
|   |  |   | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan   |  |
|   |  |   | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  |  |
|   |  |   | B Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  |  |
|   |  |   | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan   |  |
|   |  |   | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan   |  |
|   |  |   | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan   |  |
|   |  |   | Evaluasi Kelurahan   |  |
|   |  |   | C Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan  |  |
|   |  |   | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan   |  |
|   |  |   | Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan   |  |
|   |  |   | Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat   |  |
|   |  |   | D Koordinasi dan Singkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat   |  |
|   |  |   | Pencegahan Covid 19 di tingkat Desa/Kel  |  |
|   |  |   | Pembinaan Penanganan Covid 19 di tingkat Desa / Kel  |  |
|   |  |   | E Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan  |  |
|   |  |   | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara |  |

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| 3 | PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM            | Menurunnya Tingkat Kriminalitas di wilayah Kecamatan             | A Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum  |  |
|   |  |  | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan  |  |
|   |  |  | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat   |  |
|   |  |  | B Koordinasi penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah  |  |
|   |  |  | Koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia   |  |
| 4 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM   | Menurunnya Konflik sosial dan keagamaan                          | A Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah  |  |
|   |  |  | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |  |
|   |  |  | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional   |  |
|   |  |  | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa  |  |
|   |  |  | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional  |  |
|   |  |  | Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan  |  |
|   |  |  | Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila   |  |
|   |  |  | Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal   |  |
|   |  |  | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan   |  |
| 5 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Meningkanya dukungan pemerintah desa terhadap program pemerintah | A Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa  |  |
|   |  |  | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa   |  |
|   |  |  | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa   |  |
|   |  |  | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendaayagunaan Aset Desa  |  |

|  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
|  |  |  | Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan   |  |
|  |  |  | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa   |  |
|  |  |  | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa  |  |
|  |  |  | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa                                      |  |
|  |  |  | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa   |  |
|  |  |  | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                          |  |
|  |  |  | Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan   |  |
|  |  |  | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum   |  |
|  |  |  | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan                              |  |
|  |  |  | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif  |  |
|  |  |  | Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga                                 |  |
|  |  |  | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa |  |
|  |  |  | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                |  |
|  |  |  | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya  |  |
|  |  |  | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan                               |  |

#### 4.3 Target Keberhasilan Pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD melalui IKU

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029, maka Kecamatan Bontoharu menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Kecamatan Bontoharu dengan Bupati dan Wakil Bupati, dan Kecamatan Bontoharu akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LAKIP tahunan.

Sasaran yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Bontoharu dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan 2025-2029 sebagai berikut:

1. Terwujudnya pelayanan administrasi umum yang cepat, mudah dan akuntabel.
2. Menguatnya peran lembaga kemasyarakatan di tingkat Desa/Kelurahan.
3. Meningkatnya Pembinaan terhadap UMKM di Wilayah Kecamatan.
4. Meningkatnya koordinasi dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) dalam menjaga stabilitas keamanan

Tabel 4.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN BONTOHARU

| NO | INDIKATOR   | SATUAN  | TARGET TAHUN |           |           |           |           |           | KET |
|----|---|---------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
|    |   |         | 2025         | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      |     |
| 1  | 2   | 3       | 4            | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10  |
| 1  | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Bontoharu        | Persen  | 79,65%       | 80%       | 82,5%     | 85%       | 88%       | 90%       |     |
| 2  | Nilai SAKIP Kecamatan Bontoharu   | n/a     | 40           | 41        | 42        | 43        | 44        | 45        |     |
| 3  | Waktu rata-rata penyelesaian layanan administrasi (menit)                           | menit   | 10 menit     | 8 menit   | 8 menit   | 5 menit   | 5 menit   | 5 menit   |     |
| 4  | Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang menerima pembinaan dan fasilitasi dari Kecamatan | Lembaga | 2 Lembaga    | 2 Lembaga | 2 Lembaga | 2 Lembaga | 2 Lembaga | 2 Lembaga |     |
| 5  | Pertumbuhan jumlah UMKM di Wilayah Kecamatan  | Persen  | 37%          | 39%       | 41%       | 43%       | 45%       | 47%       |     |
| 6  | Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan bersama Forkopimcam                       | kali    | 4 kali       | 4 kali    | 4 kali    | 4 kali    | 4 kali    | 4 kali    |     |

**4.4. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)**

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Bontomanai sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.5 INDIKATOR KINERJA KUNCI KECAMATAN BONTOHARU**

| No | INDIKATOR  | SATUAN                             | TARGET TAHUN |      |      |      |      |      | KET |
|----|--|------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|-----|
|    |  |                                    | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |     |
| 1  | 2  | 3                                  | 4            | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10  |
| 1  | Persentase penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan kewenangan kecamatan yang tepat waktu dan sesuai SOP | Persen                             | 96%          | 96%  | 97%  | 98%  | 99%  | 100% |     |
| 2  | Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan  | Persen                             | 70           | 77,7 | 77,7 | 88,8 | 88,8 | 88,8 |     |
| 3  | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif   | Persen                             | 80%          | 80%  | 80%  | 85%  | 90%  | 95%  |     |
| 4  | Persentase pembangunan/ rehabilitasi sarana prasarana lingkup kelurahan yang diselesaikan tepat waktu              | Persen                             | 100%         | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |     |
| 5  | Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan                         | Persen                             | 80%          | 80%  | 85%  | 90%  | 95%  | 100% |     |
| 6  | Tingkat Kriminalitas di Kecamatan per 1.000 penduduk   | Angka (per seribu satuan penduduk) | 0,80         | 0,75 | 0,7  | 0,6  | 0,5  | 0,4  |     |
| 7  | Jumlah konflik berlatar belakang sosial dan keagamaan di wilayah Kecamatan   | Kali                               | 2            | 2    | 2    | 1    | 1    | 0    |     |
| 8  | Persentase Anggaran desa yang mendukung program pemerintah   | Persen                             | 62%          | 65%  | 70%  | 75%  | 80%  | 85%  |     |

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Bontoharu sebagai salah satu unit kerja yang strategis dan menunjang pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka rencana strategis Kecamatan Pasilabena merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan yang direncanakan kurung tahun 2025-2029.

Visi Kecamatan Bontoharu sebagai dasar pertimbangan dengan misi yang tercermin dalam tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sampai dengan tahun 2029, serta dapat dijadikan acuan kebijakan teknis oleh seluruh Aparatur Kecamatan dan desa/kelurahan, serta masyarakat di Kecamatan Bontoharu. Rencana strategis Kecamatan Bontoharu akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh aparatur dan masyarakat serta adanya sinergitas, tanggung jawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa.

Penting untuk diketahui bahwa berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan *political will* pimpinan organisasi.

Demikian semoga rencana strategis Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar sampai dengan tahun 2029 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kecamatan Bontoharu.

Bontoharu, 2025

**Camat Bontoharu**

**ANDI BATARA GAU SE**

Nip. 197505292010011008

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**

**MUHAMMAD NATSIR ALI**